

LAPORAN KINERJA 2014



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ngurah Rai Amlapura No. 29 Amlapura
Telp. (0363) 21037

KATA PENGANTAR

Atas asung *kertawara* nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa, Laporan Kinerja Tahun 2014 dapat disusun sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban SKPD, maka Laporan Kinerja adalah hasil realisasi seluruh rangkaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang terjabarkan ke dalam berbagai bentuk program dan kegiatan. Selanjutnya dalam rincian pelaporan kegiatan dipergunakan berbagai tolak ukur yang dirangkum dalam sejumlah indikator yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Karangasem dan Renstra SKPD.

Dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan prasyarat bagi instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat diterapkan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan ini, maka laporan yang disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika telah diusahakan memenuhi segala kriteria dalam hal penyusunan Laporan Kinerja, walaupun masih banyak terdapat kelemahan.

Dengan berhasilnya disusun Laporan Kinerja ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas semua bantuan dan koordinasi tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga bisa disusun dengan baik. Disamping itu kami menyadari bahwa dengan keterbatasan materi ini kami terbuka dengan menerima kritik dan saran demi penyempurnaan laporan ini.

Amlapura, 19 Maret 2015

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGASEM,

Ir. GDE NGURAH YUDIANTARA, M.M.

NIP. 19630929 198903 1 016

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komitmen pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh pada rentang waktu 2011-2015 ditunjukkan melalui penempatan reformasi birokrasi dan tata kelola sebagai prioritas pertama dalam RPJMN. Komitmen pemerintah dalam mereformasi birokrasi secara nyata harus ditujukan untuk mempercepat akses pelayanan publik, mereduksi sekat-sekat birokrasi dan regulasi, dan akhirnya percepatan pelayanan itu akan berdampak terhadap kenyamanan publik dalam mendapatkan pelayanan yang optimal. Seiring dengan berjalannya implementasi reformasi birokrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap kemajuan infrastruktur berbasis IT telah berupaya untuk meningkatkan IT sebagai sarana untuk mempercepat akses informasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.

Pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini memang telah difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat sehingga menghasilkan suatu revolusi teknologi baru. Dikatakan suatu revolusi karena merupakan suatu teknologi serba guna (*general purpose technology*) yang berpengaruh terhadap teknologi-teknologi lain serta menyebabkan perubahan tatanan yang cukup mendasar dalam kehidupan bersosial, berbudaya, berbisnis, dan berpolitik serta bernegara. Teknologi sangat berkembang pesat dan dipercaya dan belum kelihatan titik jenuhnya yang disertai pula dengan keadaan yang menggembirakan dengan harganya yang semakin menurun. Dengan demikian, pemanfaatannya semakin layak dalam kegunaannya di bidang organisasi, mengubah pola kehidupan dan pola kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi tatanan sosial.

Perpaduan sejumlah teknologi telah pula memungkinkan terjadinya *internetworking* yang menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang luar biasa sehingga dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi, koordinasi, dan kolaborasi yang mampu menghasilkan tindakan-tindakan dengan pertimbangan keuntungan skala global. Melalui *internetworking* tersebut dapat disebarkan informasi dalam jumlah besar untuk membentuk opini publik yang dikendalikan oleh penyebar informasi. Teknologi informasi telah membawa dunia menuju era informasi yang merupakan sumber daya paling penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk tujuan-tujuan tertentu. Dengan kecepatan dan penyebarannya yang sangat tinggi, informasi sangat mungkin

difungsikan sebagai suatu senjata strategis dalam memenangkan persaingan antar bangsa.

Sejalan dengan berkembangnya teknologi, juga diiringi dengan perkembangan informasi di masyarakat. Informasi berjalan cepat, aktual, bersifat global, serentak, dan interaktif. Media elektronik tidak lagi terkendala periodisitas. Saat terjadi peristiwa besar, serentak beredar informasi dan interaksi. Karena interaktif, informasi pun sekaligus bermakna komunikasi. Inilah realitas baru informasi; berkat revolusi informasi dan komunikasi, publik menjadi konsumen dan sekaligus produsen informasi.

Keterbukaan informasi telah membawa pula dampak pada pembenahan pelayanan di bidang informasi. Hal ini sangat penting, mengingat pelayanan informasi publik dari pemerintah kepada masyarakat selama ini belum optimal. Selain terjadinya paradigma, media massa dalam pemberitaannya juga sering memasukan setting media yang berakibat apa yang dilakukan pemerintah tidak mendapat porsi yang sebenarnya dalam pemberitaannya di media massa. Sehubungan dengan fungsi komunikasi dan informatika, Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Karangasem menjalankan fungsinya antara lain pemenuhan hak tahu publik, mengakomodir aspirasi masyarakat untuk informasi perumusan kebijakan publik dan citra positif badan publik negara. Informasi berada dalam garda depan kompetisi mendahului aset-aset yang lain. Untuk itulah, sejalan dengan pencerdasan bangsa dan masyarakat oleh penggunaan teknologi informasi, maka dalam menunjang kinerja birokrasi diarahkan pada optimalisasi teknologi informasi dalam pemerintahan yang dikenal dengan *electronic government (e-Gov)* menuju *good governance*.

Ada suatu pola sinergis antara penerapan *e-government* dengan tercapainya *good governance*. Jalur pelayanan birokrasi yang pendek, cepat, efisien, dan efektif serta mempermudah akses masyarakat dengan pemerintah yang sangat memungkinkan akses kontrol masyarakat adalah manfaat kemajuan pemanfaatan media elektronik. Melalui media elektronik, pekerjaan yang berskala besar serta pelayanan yang sangat cepat akan dapat dilaksanakan secara optimal.

Sehubungan dengan Laporan Kinerja, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menegaskan bahwa Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk

itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*) yang ditetapkan.

Dalam sistem akuntabilitas instansi pemerintah, LAPORAN KINERJA berisikan rencana strategis dan akuntabilitas kinerja. Rencana strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima tahun) yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan (Dokumen RKT) dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Laporan Kinerja yang disampaikan oleh instansi pemerintah bermanfaat untuk; (a) meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi dimata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi, (b) merupakan umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, (c) dapat mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi, (d) mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan (e) menjadikan instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dilandasi dasar hukum sebagai berikut.

- a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- f. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- g. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 39/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
- i. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per./M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
- k. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja.
- l. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
- m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/20/Menpan/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- o. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- p. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- q. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Teta Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
- s. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem.

1.3 Maksud dan tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi mandat/amanat;
2. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;
3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

1.4.1 Kondisi Umum Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem merupakan instansi pelaksana dan bagian dari Pemerintah Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tanggal 23 Juni 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2008 yang mengatur tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut.

Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika

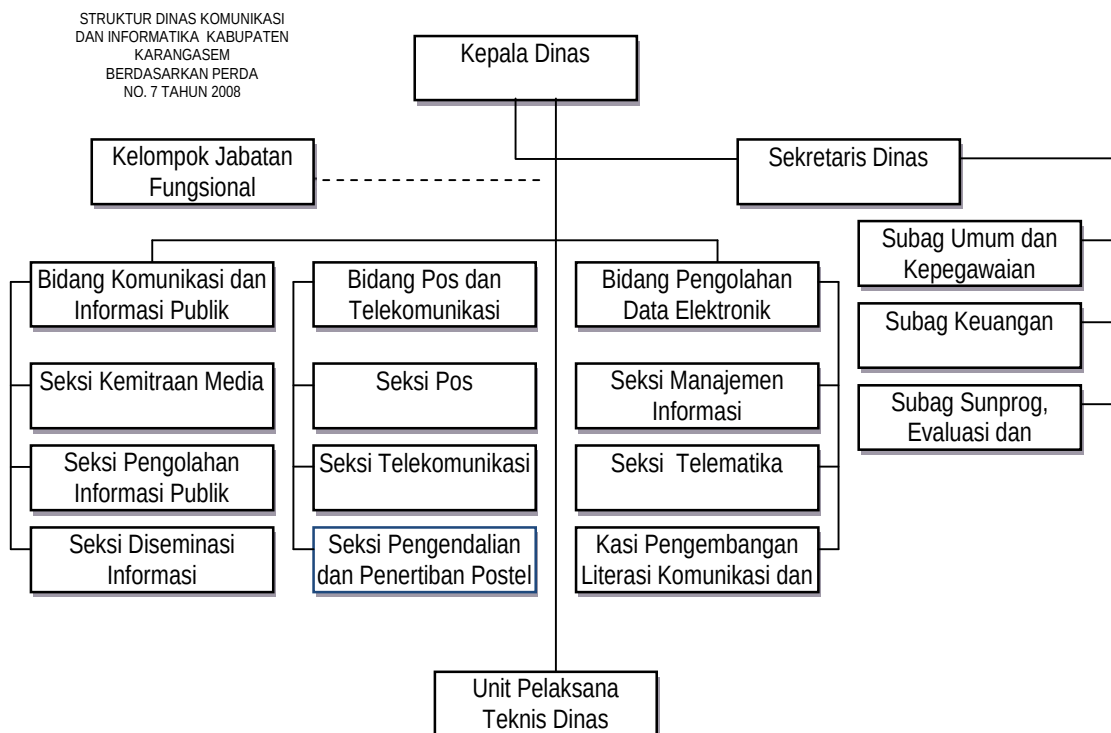
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas

1.4.2 Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 12 Kepala Seksi (Eselon IV). Struktur Organisasi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.



Struktur diskominfo Kab. Karangasem

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun rincian jabatan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem adalah; (a) tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan bidang komunikasi dan informatika, (b) dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- (a) perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, pengolahan data elektronik, serta bidang pos dan telekomunikasi,
- (b) penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika meliputi sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, pengolahan data elektronik, serta bidang pos dan telekomunikasi,

- (c) pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas komunikasi dan informatika meliputi sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, pengolahan data elektronik, serta bidang pos dan telekomunikasi,
- (d) pengkoordinasian dan pembinaan UPTD,
- (e) pelaksanaan tugas dari Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi tersebut mengacu pada ketentuan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2001 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan hukum dimaksud, dan dalam hal urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, ada 3 hal yang dijadikan kriteria yaitu: (1) **eksternalitas**, maksudnya bahwa tingkat urusan pemerintahan yang berwenang atas urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut; (2) **akuntabilitas**, maksudnya untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan klaim atas dampak tersebut atau yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut; (3) **efisiensi**, penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis.

1.6 Sumber Daya Diskominfo

1.6.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam menggerakkan roda organisasi, perlu ditunjang dengan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan pegawai sehingga segala tupoksi organisasi berjalan baik. Sumber daya aparatur secara terus-menerus perlu dikembangkan dengan pendidikan formal maupun non formal karena instrument penting dalam memajukan organisasi terletak pada kualitas sumber daya manusia yang memadai. Pengembangan sumber daya manusia saat ini dituntut untuk mampu mengadopsi dan mengaplikasikan kemajuan teknologi informasi sebagai suatu media yang sangat membantu penyelesaian pekerjaan, efektifitas kerja, efisiensi anggaran, dan peningkatan pelayanan publik.

Dilihat dari kualitas pendidikan dan kuantitas yang ada, sumber daya aparatur yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Daftar Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Sesuai Kualifikasi Pendidikan

No.	Sumber Daya Aparatur (PNS) Berdasarkan			Prosentase	Keterangan
A.	Jenjang Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (Org)		
	S2	Magister Manajemen	1	44,83%	Persentase ini membandingkan antara jumlah PNS yang sarjana dengan yang belum sarjana
		Magister Budaya dan Agama	1		
		Magister Administrasi Publik	1		
	S1	Ekonomi Manajemen	2		
		Ekonomi Pembangunan	1		
		Sarjana Sastra	2		
		Sarjana Hukum	3		
		Sarjana Sosial	1		
		Sarjana Komputer	1		
	Jumlah		13		
	D3	Administrasi Niaga	1	55,17%	
	SMA		13		
	SMP		2		
	SD		-		
	Jumlah		16		
B.	Jenis Kelamin				
	Laki		20		
	Perempuan		9		
	Jumlah PNS		29	55,77%	% jumlah PNS dan Tenaga Kontrak
C.	Tenaga Kontrak		19		
	Jumlah Tenaga Kontrak		23	44,23	
	Jumlah Total		49		

Daftar Pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika Sesuai keadaan dan kebutuhan

No.	Pejabat Struktural	Jabatan Yang Ada	Jabatan Yang Terisi		Jabatan Yang Tidak Terisi
			Laki	Perempuan	
1	Eselon IIb	1	1	-	-
2	Eselon IIIa	1	-	1	-
3	Eselon IIIb	3	3	-	-
4	Eselon IVa	12	4	3	5
Jumlah		17	8	4	5

Daftar Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Sesuai Kualifikasi Pendidikan

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	Juru Muda (I/a)	-	-	-
2	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
3	Juru (I/c)	-	-	-
4	Juru Tk. I (I/d)	2	-	2
5	Pengatur Muda (II/a)	1	2	3
6	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	3		3
7	Pengatur (II/c)	2	1	3
8	Pengatur Tk. I (II/d)		1	1
9	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	2	4
10	Penata (III/c)	1	1	2
11	Penata Tk. I (III/d)	5	1	6
12	Pembina (IV/a)	2	-	2
13	Pembina Tk. I (IV/b)	1	1	2
14	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
TOTAL :		20	9	29

Sumber daya aparatur seperti persentase di atas menggambarkan tingkat pegawai yang pendidikan formalnya berijazah sarjana masih minim. Terutama yang kualifikasi pendidikannya berkaitan langsung dengan teknologi informasi hanya terdapat satu orang yang sarjana komputer. Secara teknis, pendidikan formal seperti ini sangat diperlukan terutama dalam hal pengembangan kapasitas penunjang *e-government* seperti pengembangan jaringan (LAN dan WAN), pengembangan sistem informasi, pengolahan data berbasis computer. Kekurangan ini bisa diatasi dengan peningkatan kapasitas kemampuan personil dengan pemberian pendidikan dan pelatihan yang memadai.

Di samping kualifikasi pendidikan yang kurang, jumlah pejabat eselon khususnya pada eselon IV juga masih kurang. Kurangnya pejabat yang menempati posisi pada setiap unit kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika sangat mempengaruhi kinerja mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pada akhir tahun terutama pada penyusunan akuntabilitas kinerja, penyajian laporan berdasarkan fakta yang dilaksanakan di lapangan sangatlah kurang yang berakibat pada penyusunan perencanaan kegiatan dan kinerja berikutnya.

1.6.2 Sumber Daya Pengembangan Informasi dan Telematika

Sejalan dengan pengembangan *e-government* sesuai dengan amanat Inpres Nomor 3 tahun 2003, diperlukan perencanaan yang berupa cetak biru (*blue print*) sebagai dokumen yang dijadikan pedoman dalam tahapan-tahapan pengembangan sistem teknologi informasi. Berdasarkan dokumen perencanaan ini, dilanjutkan dengan penyiapan segala infrastruktur seperti piranti keras dan piranti lunak dan sistem jaringan sistem informasi.

1. Master Plan Pengembangan Teknologi Informasi

Master plan ini nantinya akan dipakai dasar dalam pembangunan teknologi informasi di Kabupaten Karangasem yang pengembangannya diarahkan pada beberapa indikator sebagai berikut.

- a. Tersedianya desain sistem informasi bidang perekonomian Pemerintah Kabupaten Karangasem yang merupakan dokumen teknis memuat struktur *database* dan desain antarmuka sistem informasi bidang perekonomian.
- b. Tersedianya desain sistem informasi bidang sosial, budaya dan politik, yang merupakan dokumen teknis yang memuat struktur *database* dan desain antarmuka sistem informasi bidang sosial, budaya dan politik.
- c. Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) sistem informasi dan telematika yang dijadikan dokumen pengaturan tata kerja pemanfaatan teknologi informasi .

2. Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web

Desain informasi dalam web sangat efektif digunakan oleh pengguna informasi di seluruh tempat dengan bantuan akses internet. Sarana website pemerintah daerah Kabupaten Karangasem telah pula dikembangkan dengan subdomain-subdomain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi website antara lain sebagai berikut.

1. Fungsi komunikasi. Situs web yang mempunyai fungsi komunikasi dan dilengkapi fasilitas yang memberikan fungsi-fungsi komunikasi, seperti web mail, form contact, chatting, forum, dan yang lainnya.
2. Fungsi informasi. Situs web yang memiliki fungsi informasi pada umumnya lebih menekankan pada kualitas bagian kontennya karena tujuan situs tersebut adalah menyampaikan isinya. Situs ini berisi teks dan grafik yang dapat diunduh (*download*) dengan cepat.
3. Fungsi *entertainment*. Situs web juga dapat digunakan untuk *entertainment*/hiburan. Web dilengkapi animasi gambar dan elemen bergerak yang dapat meningkatkan mutu presentasi desainnya, meski tetap harus mempertimbangkan kecepatan *download*-nya. Beberapa fasilitas yang

memberikan fungsi hiburan adalah game online, film online, musik online, dan sebagainya.

4. Fungsi transaksi. Situs web dapat dijadikan sarana transaksi bisnis, baik barang, jasa, atau lainnya. Situs web ini menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. Pembayaran bisa menggunakan kartu kredit, transfer, ataupun dengan membayar secara langsung.

3. Hotspot

Hotspot adalah salah satu bentuk pemanfaatan teknologi *wireless local area network (LAN)* pada lokasi-lokasi publik. Hotspot memungkinkan pengguna wifi (*wireless fidelity*) untuk terhubung dengan pusat titik akses internet (hotspot). Adapun fungsi hotspot ini ditujukan terutama untuk masyarakat sekitar (*hotspot area*) dalam mengakses internet dengan gratis. Peningkatan layanan melalui hotspot yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini kecepatan aksesnya telah ditingkatkan dengan pertimbangan kuantitas pengguna yang semakin meningkat.

1.6.3 Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan kegiatan pada seluruh unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut.

No.	Nama Barang	Kondisi	
		Baik	Rusak
1	Bangunan		
	Gedung	2 unit	-
2	Alat Angkutan		
	Mobil operasional	1 unit	-
	Sepeda Motor Operasional	3 unit	
3	Perlengkapan Kantor		
	Meja	46 buah	-
	Kursi	50 buah	-
	Lemari katalog	1 buah	-
	Lemari Kaca	4 buah	-
	Lemari penyimpan arsip	2 buah	-
	Filling Kabinet	4 buah	-
	Komputer	15 unit	-

	Server	2 unit	-
	Laptop	5 unit	-
	Printer	8 unit	-
	UPS	2 unit	-
	Kamera	3 buah	-
	Handi Cam	1 buah	-
	Infocus	1 buah	-
	Sofa	2 set	-
	AC Ruang	14 buah	-
	Papan	2 buah	-
4	Alat Telekomunikasi		
	Telepon	6 buah	-
	Faximil	1 buah	-

Menyimak dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana kerja yang digunakan cukup memadai. Jumlah sarana kerja yang digunakan secara langsung seperti komputer dan perlengkapannya sudah mencukupi untuk semua unit kerja. Untuk sarana perlengkapan kantor sebagai sarana penunjang dari segi kuantitas memang masih ada yang perlu di tambah karena dari segi umur sudah layak nya diadakan penghapusan dari aset daerah. Segala sarana yang ada diusahakan dapat menunjang pelaksanaan seluruh kegiatan sehingga bisa terlaksana dengan baik.

1.7 Sistematika Penyusunan LAPORAN KINERJA

Penulisan LAPORAN KINERJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2014 disusun dengan sistematika berdasarkan Lampiran Surat Bupati Karangasem Nomor 060/092/Org tanggal 6 Januari 2014, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menguraikan latar belakang penulisan Laporan Kinerja SKPD

B. Gambaran Umum SKPD

Menguraikan gambaran mengenai apa dan bagaimana SKPD yang melaporkan, dasar pembentukan organisasi, sarana dan prasarana pendukung yang ada pada SKPD, tupoksi, bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki, SDM pendukung, organisasi dll yang menyangkut SKPD pelapor sehingga mampu memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai SKPD pelapor.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Menguraikan visi misi SKPD, strategi dan arah kebijakan umum SKPD, atau dapat juga memuat renstra yang menyangkut perencanaan SKPD. Memuat matrik renstra SKPD, penjelasan mengenai matrik renstra dll yang berkaitan dengan renstra

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD

Menguraikan penjelasan IKU SKPD, Kolom IKU serta penjelasan mengenai kolom IKU SKPD yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan pada SKPD pelapor

C. Renja/RKT SKPD

Menguraikan rencana kerja tahunan yang merupakan turunan dari renstra SKPD untuk Renja hanya menjelaskan sasaran, Indikator dan target yang ingin dicapai dalam tahun pelaporan

D. Penetapan Kinerja Tahun 2014

Menguraikan isi penetapan kinerja (PK) tahun 2014, penjelasan mengenai isi kolom penetapan kinerja tahun 2014 disertai penjelasan dan alasan penetapan sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam PK

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Evaluasi Kinerja

Berisi gambaran capaian kinerja SKPD secara umum pada tahun pelaporan. Berapa sasaran yang ditetapkan, berapa indikator yang dipakai tolok ukur dan target capaian secara umum baik fisik maupun keuangan dalam bentuk persentase, dan hal lainnya yang menyangkut evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun pelaporan.

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Menguraikan penjelasan pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang dijadikan tolok ukur capaian kegiatan. Sajikan kolom capaian sasaran dan berikan penjelasan indikator dan capaian targetnya. Apabila capaian tidak sesuai target atau melebihi target agar disampaikan alasan dan data pendukung lainnya yang bisa menguatkan analisis capaian. Sampaikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang akibat pencapaian sasaran disertai data pendukungnya. Uraikan mengenai cara, upaya atau proses pelaksanaan pencapaian masing-masing indikator. Prestasi yang diperoleh pada tahun pelaporan. Sampaikan perbandingan data dari 2 tahun sebelumnya untuk capaian target serta hal lainnya yang dapat menggambarkan kinerja yang telah dilakukan SKPD pada tahun pelaporan

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran kedepan yang harus dilakukan untuk kemajuan pemerintah Kabupaten Karangasem

LAMPIRAN

Berisi : Lampiran I : Matrik Renstra

Lampiran II : Matrik IKU SKPD

Lampiran : Matrik Renja/RKT 2014

III

Lampiran : Pernyataan Penetapan Kinerja dan kolom penetapan

IV kinerja 2014

Lampiran V : Formulir pengukuran kinerja tahun 2014

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis yang dituangkan melalui dokumen renstra adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, sasaran, indikator sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Sebelum ditetapkan tujuan organisasi, langkah paling awal dirumuskan adalah uraian visi yang merupakan cara pandang jauh kedepan yang memberikan gambaran akan sebuah capaian kondisi tertentu dan pada waktu tertentu. Berdasarkan visi ini, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan cara dan langkah terhadap hal-hal yang harus dikerjakan dalam usaha pencapaian visi. Dalam misi terkandung uraian sektor-sektor mana yang harus dikerjakan melalui perubahan-perubahan yang signifikan dengan kondisi ke depan yang meningkat dan lebih baik. Selanjutnya barulah memilih tujuan organisasi, sasaran, indikator, strategi, pemilihan dan pengkajian program terpilih, dan penentuan alternatif kegiatan.

Sehubungan dengan penetapan dokumen rencana strategis, Dinas Komunikasi telah membuat dokumen tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 2 Juni 2011. Dengan acuan RPJMD Kabupaten Karangasem yang ditetapkan dengan Perda Nomor 9 tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011, renstra yang disusun merupakan dokumen sinergis dan acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun program dan kegiatan. Rencana strategis ini menempati posisi yang krusial, karena menentukan kekomprehensifan, kekoherenan, dan keseimbangan rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek yang dihasilkan oleh organisasi. Perencanaan strategis menghasilkan keluaran yaitu, (1) sasaran strategis (*strategic objective*), (2) inisiatif strategis (*strategic initiatif*) dan (3) target. Perencanaan strategis merupakan suatu proses manajemen yang sistematis yang dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama beberapa tahun ke depan.

Ada beberapa hal yang melandasi pentingnya suatu organisasi membuat perencanaan strategis; (a) perencanaan strategis memberikan kerangka dasar bagi perencanaan-perencanaan lainnya, (b) pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya, dan (3) perencanaan strategis merupakan titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis bagi suatu organisasi sangat

penting, karena tanpa strategi dalam mengelola organisasi seorang manajer seolah-olah melangkah dalam ketidakpastian. Perencanaan strategis merupakan faktor internal yang penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

2.1.1 Visi

Visi SKPD lahir dari rumusan visi Kabupaten Karangasem yaitu “***Mewujudkan Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma Periode II***” . Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta mengacu pada visi Kabupaten Karangasem, maka rumusan visi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

**Terwujudnya Transparansi Komunikasi dan Informatika Menuju
Masyarakat Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma**

Rumusan visi tersebut didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan informatika.

Visi dapat dioperasionalkan melalui beberapa pemahaman sebagai berikut.

- Transparansi mengandung pemahaman atas kondisi seluruh unsur penyelenggara negara baik secara individual maupun institusional mampu bekerja secara profesional, integritas, akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam aspek prosedural operasional, transparansi komunikasi dan informatika dipahami sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai dan dapat dijangkau oleh publik. Dalam menunjang keterbukaan informasi kepada publik, peran teknologi akan sangat membantu kecepatan akses informasi dan layanan publik.
- Masyarakat Karangasem *jagadhita ya ca iti dharma* dipahami sebagai suatu kondisi ideal yang ingin dicapai oleh pembangunan dan pelayanan komunikasi dan informatika berbasis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi diberikan seluas-luasnya bagi masyarakat di seluruh wilayah sesuai dengan nilai-nilai etika budaya dan agama.

- Peningkatan komunikasi dan informatika dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih, kompeten dan melayani;
- Dalam rangka pemantapan pelaksanaan teknologi informasi diperlukan kebijakan-kebijakan untuk mempercepat dan memastikan pelaksanaan komunikasi dan informatika di seluruh organisasi pemerintah;
- Kebijakan terhadap komunikasi dan informatika yang efektif dapat disusun hanya jika dilakukan melalui proses penempatan prioritas pembangunan daerah dibidang IT;
- Upaya pemantapan pelaksanaan komunikasi dan informatika juga harus didukung dengan sistem monitoring dan evaluasi yang baik untuk menjamin tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam setiap tahapannya.

2.1.2 Misi

Untuk mengoperasionalkan visi, maka ditetapkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem yang telah diadakan peninjauan dan perbaikan kembali khususnya misi nomor 3 sebagai berikut.

1. **Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan Dengan Lembaga Komunikasi Untuk Mewujudkan Kualitas Diseminasi dan Layanan Informasi**
2. **Mengembangkan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Jaringan, Sistem Aplikasi, Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Serta Layanan Berbasis IT**
3. **Mengembangkan sarana dan prasarana layanan telekomunikasi yang bermanfaat bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, misi tersebut dapat dilaksanakan melalui beberapa langkah-langkah.

1. **Merumuskan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan pemantapan pelaksanaan komunikasi dan informatika;**
2. **Melaksanakan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemantapan komunikasi dan informatika;**
3. **Memastikan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pemantapan komunikasi dan informatika melalui monitoring dan evaluasi.**

2.1.3 Tujuan Strategis

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka dapat diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Komunikasi dan Informatika mengukur sejauh mana misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik
2. Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal Informasi Publik
3. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan jaringan teknologi informasi
4. Tersedianya informasi dan layanan publik yang dapat diakses secara on line
5. Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui internet
6. Terwujudnya transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah
7. Meningkatnya layanan telekomunikasi bagi pemerintah dan masyarakat

2.1.4 Sasaran Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, sasaran yang ingin dicapai adalah sasaran sebagaimana dirumuskan dalam misi III sasaran 3 RPJMD Kabupaten Karangasem 2011–2015, yaitu: **Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Dengan Pemanfaatan IT**. Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut.

Arah Kebijakan RPJM 2011-2015	Sasaran Strategis Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Unit Kerja
Optimalisasi Layanan Komunikasi dan Informasi Serta Pelayanannya Bagi Pemerintah dan Masyarakat	Meningkatnya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) sebagai mitra penyebar informasi	Bidang Kominfo

Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Untuk Mencapai Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik	Tersebar nya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat	Bidang Kominfo
Meningkatnya Sistem Jaringan di Segala SKPD Untuk Menciptakan Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Secara Koneksitas dan Peningkatan Pemanfaatan Media Internet Yang Lebih Luas di Masyarakat	Meningkatnya fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan jaringan akses internet	Bidang PDE
	Meningkatnya kualitas konten layanan informasi kepada masyarakat berbasis web	Bidang PDE
	Meningkatnya efisiensi, transparansi, persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Bidang PDE
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa	Bidang Postel

Untuk mengukur capaian terhadap sasaran strategis di atas, maka pengukurannya dituangkan dalam indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

2.1.5 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi adalah upaya untuk mencapai tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi. Strategi memberikan pengarahan terpadu bagi organisasi dan berbagai tujuan organisasi serta memberikan pedoman pemanfaatan sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Strategi menghubungkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan tantangan dan resiko yang harus dihadapi dari lingkungan di luar organisasi.

Untuk menghadapi tantangan dan resiko tersebut, strategi dapat disesuaikan dengan faktor-faktor eksternal dan internal yang selalu berubah. Salah satu perumusan strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan analisa dengan memakai matrik **strengths, weaknesses, opportunities**, dan **threats** atau lebih dikenal dengan nama Analisa SWOT. Analisa SWOT yang digunakan adalah mengidentifikasi beberapa hal yaitu untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

a. Identifikasi Faktor Strategi Internal

Kekuatan (*strengths*). Kekuatan yang bisa digunakan antara lain sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6).
2. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 40).
3. Fasilitas pendukung informatika yang relatif memadai.
4. Adanya komitmen berupa visi, misi dan tujuan dalam rangka pengembangan komunikasi dan informatika.

Kelemahan (*weaknesses*). Faktor-faktor kelemahan yang menjadi perhatian adalah:

1. Terbatasnya SDM yang berpengalaman dan memiliki kualifikasi pendidikan dalam bidang informatika.
2. Keterbatasan anggaran.
3. Terbatasnya kemampuan pegawai dalam pengelolaan kegiatan sehingga hasilnya belum dapat diharapkan secara maksimal.

b. Identifikasi Faktor Strategi Eksternal

Peluang (*opportunities*)

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Perkembangan IPTEK yang pesat dan mendukung kemajuan tugas pokok dan fungsi unit kerja.
2. Terjalannya koordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya.
3. Kerjasama dan dukungan yang baik dari Departemen Komunikasi dan Informatika.
4. Kondisi Kabupaten Karangasem yang kondusif.

Tantangan (*threats*). Tantangan yang mesti diantisipasi adalah:

1. Masih adanya intervensi politik dalam penetapan kebijakan pembangunan.
2. Kurangnya perhatian terhadap kebijakan pembangunan Teknologi Informasi.

2.1.6 Indikator Kinerja Utama, Tujuan, dan Target Jangka Menengah

Untuk mengukur tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan sasaran strategis dan setiap sasaran strategis ditetapkan

indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2014). Sebagai instrumen mengukur kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, ditetapkan pula Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama ini juga mengacu pada RPJMD 2011 – 2015 serta Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang disertai dengan target-targetnya sebagai berikut.

2.1.7 Rencana Kerja SKPD

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan serta anggaran dan penetapan indikator/target capaian kinerja unit kerja bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan program kegiatan tahun 2014 yang terarah, sistematis, terpadu, efektif, dan efisien maka diperlukan kegiatan penyusunan RKT. Sistem penganggaran hendaknya mengacu dan berpedoman terhadap beberapa hal, yaitu: kesesuaian terhadap kebutuhan masyarakat dan berdampak pada kemajuan serta tepat dalam segi waktu dan sasaran.

Pada garis besarnya, ada tiga hal yang penting dalam merumuskan rencana kerja di antaranya adalah; (1) sasaran strategis, (2) indikator kinerja, dan (3) target. Ketiganya ini merupakan turunan tujuan yang tertuang dalam renstra SKPD. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur. Sasaran strategis menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun dan dialokasikan dalam 5 lima periode secara tahunan. Selanjutnya rencana strategis dijabarkan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun.

Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai.

Program dan Kegiatan

Keseluruhan Program dan Kegiatan disertai dengan indikator kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2014 antara lain sebagai berikut.

1. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa.

Program ini merupakan wujud dari misi I *“meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga komunikasi untuk mewujudkan kualitas diseminasi dan layanan informasi”*. Pentingnya program ini diarahkan pada pentingnya informasi bagi masyarakat dan pemerintah. Untuk pengembangan informasi yang berkembang demikian cepat, daya dukung teknologi yang merambah cepat dan memberikan multi fungsi harus disinergikan sehingga informasi bisa bermanfaat dengan baik. Disamping itu, pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM) mesti betul-betul difungsikan. Program ini terutama diarahkan pada peningkatan kinerja sebagai berikut.

1. Belum optimalnya fungsi KIM sebagai mitra informasi pemerintah. Walaupun pada tahun 2014 diseluruh desa capaian organisasi KIM sesuai data telah menunjukkan pada setiap desa telah terbentuk KIM atau capaian 100%, tetapi bukti menunjukkan bahwa sangat kecil lembaga informasi itu betul-betul berfungsi signifikan.
2. Pada peningkatan daya dukung pengembangan informasi melalui teknologi, sampai tahun 2014 capaian pengembangannya belum optimal. Fasilitas jaringan internet pada SKPD belum memadai, subdomain website pemerintah daerah baru tercapai 24%, serta layanan internet kepada masyarakat di kecamatan masih terkendala peralatan.

Untuk tercapainya kinerja di atas, kegiatan yang dilaksanakan adalah;

- ✓ Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial dan Lembaga Komunikasi Pemerintah
- ✓ Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
- ✓ Pemeliharaan dan Pengembangan Website
- ✓ Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

2. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

Program ini dilaksanakan dengan selaras dengan kebijakan RPJM Kabupaten Karangasem *“Meningkatkan penyebaran informasi untuk mencapai keterbukaan informasi pelayanan publik”*. Untuk mendukung arah kebijakan ini, telah dilakukan dengan penyebaran informasi sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal (SPM) dengan indikator seperti : pementasan bondres sebagai saluran informasi kepada masyarakat, penyebaran majalah informasi, pelaksanaan sarasehan informasi publik, dan media luar ruang seperti spanduk informasi. Dukungan terhadap

kebijakan keterbukaan informasi publik ini diupayakan juga melalui sosialisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi yang nantinya outcome terhadap kegiatan ini diharapkan setiap SKPD telah melaksanakan layanan informasi kepada pengguna sesuai dengan standar yang diharapkan. Program ini dikerjakan melalui pelaksanaan kegiatan :

- ✓ Kegiatan Penyebarluasan informasi publik melalui media cetak, elektronik, pertunjukan seni tradisional, sarasehan, pameran dan dialog publik.
- ✓ Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- ✓ Peningkatan Pelayanan Informasi Pembangunan Daerah

3. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa elektronik melalui LPSE Kabupaten Karangasem merupakan perwujudan dari tekad untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang diperkuat Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2012, tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Bahwa dengan pelaksanaan pengadaan melalui LPSE, akan menimbulkan efek positif berupa pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, terbuka, kompetitif yang akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan **Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik**. Lelang melalui (LPSE) merupakan strategi jitu mencegah KKN. Iklim pengadaan barang/jasa pemerintah akan semakin kondusif seiring penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Melalui penerapan *e-procurement* sistem pengadaan akan berubah dan semakin kondusif sehingga kinerja semakin meningkat serta terciptanya transparansi dan akuntabilitas, persaingan sehat, sekaligus mendukung percepatan pelaksanaan APBD dan tercapainya *good governance* dan efisiensi anggaran. Kini penerapan *electronic goverment* (e-Gov) yang salah satunya LPSE, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menguntungkan kelompok usaha kecil dan menengah. Selain meningkatkan efisiensi dan efektivitas, LPSE juga meningkatkan iklim kompetisi yang sehat dan kemudahan akses bagi seluruh *stakeholder* untuk mengikuti pengadaan barang/jasa Pemerintah (PB/JP). Dibandingkan dengan sistem pengadaan barang/jasa yang manual, pengusaha kecil dan menengah mempunyai peluang lebih untuk mengikuti PB/JP melalui LPSE. Kelompok usaha kecil dan menengah dapat melihat pengumuman dari website dan memasukkan penawaran melalui wartel atau warnet, sehingga menjangkau banyak tempat karena dapat dilakukan dari mana saja.

4. Program Fasilitas Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan pekerjaan dan peningkatan kinerja birokrasi. Pada dasarnya, pelatihan sumber daya manusia di bidang IT adalah implementasi dari harapan untuk mewujudkan *elektronik government* di Indonesia sesuai dengan beberapa peraturan; (1) Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, (2) KEPMENPAN No. 63 th 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi. Program ini merupakan pengembangan misi mengoptimalkan layanan telekomunikasi untuk percepatan akses komunikasi bagi masyarakat. Sebagai tindak lanjut terhadap kebijakan RPJM Kabupaten Karangasem "*Meningkatnya sarana dan prasarana telekomunikasi*" sampai tahun 2014 relaisasi atas harapan penyiapan sarana ini telah dilakukan dengan kegiatan monitoring menara telekomunikasi di 8 kecamatan dan sampai tahun 2014, jumlah menara telekomunikasi terdata 90 menara pada 68 zona dari 91 zona menara yang ditetapkan. Di samping itu, penyiapan sarana telekomunikasi juga difasilitasi oleh radio pancar ulang pada 3 titik lokasi.

2.1.8 Penetapan Kinerja Tahun 2014

Penetapan kinerja (PK) merupakan pernyataan janji instansi pemerintah untuk mencapai suatu kinerja tertentu dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, yaitu berupa hasil atau manfaat. Kewajiban untuk menyusun penetapan kinerja ini diatur dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 butir ketiga dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan SE MENPAN Nomor 31 Tahun 2004 dan terakhir telah diperbarui dengan Peraturan MENPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa penetapan kinerja dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat eselon II sampai ke pimpinan instansi atau kepala daerah. Batas waktu penyampaian PK paling lambat adalah tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Dengan adanya kebijakan tersebut, indikator ini ditetapkan untuk menilai keefektifan pencapaian sasaran-sasaran instansi pemerintah dalam memberikan hasil dan manfaat terutama bagi masyarakat.

Penetapan kinerja merupakan kumpulan dari beberapa sasaran strategis, dan setiap sasaran strategis dirumuskan indikator kinerja serta target yang telah ditetapkan. Penetapan kinerja ini ditetapkan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan pada tahun anggaran bersangkutan.

Adapun **penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2014** adalah sebagai berikut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) sebagai mitra penyebar informasi	Persentase Desa di Kabupaten Karangasem yang telah membentuk Lembaga Kelompok Informasi Masyarakat	78 KIM	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Pembinaan Pengembangan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial dan Lembaga Komunikasi Pemerintah	30.000.000
2	Tersebar nya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat	Persentase layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan standar SPM	100%	Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Penyebarluasan informasi publik melalui media cetak, elektronik, pertunjukan seni tradisional, sarasehan, pameran dan dialog publik	180.000.000
		Jumlah SOP pengelolaan informasi publik yang diterbitkan dan telah dipedomani sebagai standar pelaksanaan kerja	4 SOP			25.000.000
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan layanan informasi publik yang terukur sesuai dengan pedoman baku	1 SKPD			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
3	Meningkatnya fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan jaringan akses internet	Jumlah SKPD Pemkab Karangasem yang terkoneksi jaringan internet melalui fasilitasi hotspot	1 SKPD	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	41.000.000
4	Meningkatnya kualitas konten layanan informasi kepada masyarakat berbasis web	Persentase SKPD pemerintah daerah yang memiliki website informatif sesuai acuan standar	10 SKPD (24% dari 41 SKPD)		Pemeliharaan dan Pengembangan Website	79.000.000
		Jumlah pengaduan informasi publik oleh masyarakat yang terakomodasi di website pemerintah yang ditindaklanjuti	9 Pengaduan			
		Jumlah fasilitasi layanan internet sehat dan edukatif kepada masyarakat	20 kali	Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi		26.000.000
5	Meningkatnya efisiensi, transparansi, persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui electronic processing	100%	Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	451.800.000
6	Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa	Jumlah menara telekomunikasi yang layak memberikan akses telekomunikasi dengan baik kepada masyarakat dan pengguna sesuai peraturan yang berlaku	91 menara	Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Telekomunikasi	50.000.000
		Persentase penanganan pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi pembangunan menara telekomunikasi	100%			
		Jumlah radio pancar ulang (repeater) yang layak memberikan akses telekomunikasi dengan baik	3 unit	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Biaya Jasa Pemeliharaan Repeater	87.680.000
	Jumlah Anggaran					970.480.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2014, dilakukan kajian ulang dengan mencermati kembali sasaran-sasaran strategis komunikasi dan informatika sesuai yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Karangasem. Untuk memenuhi sasaran strategis tersebut, maka dalam tahun 2014 ditetapkan 12 indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa keseluruhan sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, sedangkan dari 12 indikator kinerja terdapat 10 indikator kinerja di atas 95%, 1 kegiatan yang indikator kinerjanya melebihi 100% dan 1 indikator kinerjanya kurang dari 90%. Kriteria pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya melebihi 80%.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi satuan organisasi/kerja. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja tersebut. Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik, yang merupakan hal yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Melalui pengukuran kinerja diharapkan satuan organisasi dapat mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program satuan organisasi/kerja dapat diukur dan dievaluasi. Selanjutnya, dari pengukuran kinerja, setiap instansi dapat diperbandingkan dengan instansi yang sejenis, sehingga penghargaan dan tindakan disiplin dapat dilakukan secara lebih objektif. Fungsi pengukuran kinerja sebagai alat manajemen diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka upaya memperbaiki kinerja organisasi.

5. Membantu memahami proses kegiatan, peningkatan yang perlu dilakukan, serta mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Syarat keberhasilan pengukuran kinerja yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika agar terlaksana dengan baik, maka upaya dan langkah-langkah yang dilakukan secara sinergis antara pimpinan dan staf adalah sebagai berikut.

1. Membuat suatu komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya segera. Yang perlu dilakukan adalah segera memulai upaya pengukuran kinerja dan tidak perlu mengharap pengukuran kinerja akan langsung sempurna. Nantinya akan dilakukan perbaikan atas pengukuran kinerja yang telah disusun;
2. Memperlakukan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan karena pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bersifat iteratif (berulang-ulang). Proses ini merupakan suatu cerminan dari upaya untuk selalu berupaya memperbaiki kinerja.
3. Menyesuaikan proses pengukuran kinerja dengan satuan organisasi/kerja. Satuan organisasi/kerja harus menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan besarnya struktur satuan organisasi/kerja, visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat disimak dalam tabel berikut.

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Dana		
						Anggaran	Realisasi	%
Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial Dan Lembaga Komunikasi Pemerintah	Persentase Desa di Kabupaten Karangasem yang telah membentuk Lembaga Kelompok Informasi Masyarakat	78 KIM	78 KIM	100%	30.000.000	26.813.450	89,38
Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Cetak, Elektronik, Pertunjukan Seni Tradisional, Sarasehan, Pameran Dan Dialog Publik	Persentase layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan standar SPM	100%	78,33	78,33%	180.000.000	177.306.100	98,50
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah SOP pengelolaan informasi publik yang diterbitkan dan telah dipedomani sebagai standar pelaksanaan kerja	4 SOP	4 SOP	100%	25.000.000	24.108.400	96,43
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan layanan informasi publik yang terukur sesuai dengan pedoman baku	1 SKPD	1 SKPD	100%			
Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan komunikasi dan Informasi	Jumlah SKPD Pemkab Karangasem yang terkoneksi jaringan internet melalui fasilitasi hotspot	1 SKPD	1 SKPD	100%	41.000.000	39.627.000	96,65
	Pemeliharaan dan pengelolaan website	Persentase SKPD pemerintah daerah yang memiliki website informatif sesuai acuan standar	10 SKPD (24% dari 41 SKPD)	10 SKPD (24% dari 41 SKPD)	100%	79.000.000	76.074.600	96,30
		Persentase pengaduan informasi publik oleh masyarakat yang terakomodasi di website pemerintah yang ditindaklanjuti	100%	70%	70%			
	Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah fasilitasi layanan internet sehat dan edukatif kepada masyarakat	20 kali	18 kali	90%	26.000.000	20.948.900	80,57

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Dana		
						Anggaran	Realisasi	%
Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui electronic processing	59% (50 paket dari 170 pket pengadaan)	78% (133 paket dari 170 pket pengadaan)	266%	451.800.000	437.491.700	96,83
Pengembangan Pos Dan Telekomunikasi	Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Telekomunikasi	Jumlah menara telekomunikasi yang layak memberikan akses telekomunikasi dengan baik kepada masyarakat dan pengguna sesuai peraturan yang berlaku	100%	99%	99%	50.000.000	48.153.800	96,31
		Persentase penanganan pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi pembangunan menara telekomunikasi	100%	100%	100,0%			
		Persentase radio pancar ulang (repeater) yang layak memberikan akses telekomunikasi dengan baik	100%	100%	100%	87.680.000	83.748.328	95,52

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2014 Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran: Meningkatnya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) sebagai mitra penyebar informasi

Sasaran ini mengarahkan pelayanan informasi terhadap publik khususnya kepada masyarakat sejalan dengan kemajuan perkembangan kemajuan peradaban yang dicirikan tingkat penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang. Akses pemberian pelayanan publik yang tidak lagi boleh ditutup-tutupi adalah bukti bahwa informasi mengandung manfaat penting sebagai sarana pengembangan pribadi khususnya pencerdasan masyarakat. Hal-hal yang terkait dengan pelembagaan informasi semakin dikuatkan baik lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat. Langkah-langkah dalam menguatkan dan memudahkan penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi selanjutnya dapat dijelaskan dalam beberapa indikator sebagai berikut.

Persentase Desa di Kabupaten Karangasem yang telah membentuk Lembaga Kelompok Informasi Masyarakat

- Berdasarkan data yang ada, perkembangan lembaga Kelompok Informasi Masyarakat sebagai mitra strategis yang menerima, menyerap dan menyebarkan informasi terus mengalami pertumbuhan. Secara kuantitas, data KIM yang ada di Kabupaten Karangasem tetap menunjukkan perkembangan yang berarti. Sampai dengan tahun 2014, setiap desa telah ada KIM dengan data sebagai berikut. Perkembangan pertumbuhan KIM dari tahun 2012 s.d. 2014 adalah sebagai berikut.

Nama Kecamatan	2012		2013		2014	
	Ds/Klr	KIM	Ds/Klr	KIM	Ds/Klr	KIM
Karangasem	11	10	11	11	11	11
Manggis	12	9	12	9	12	12
Bebandem	8	7	8	7	8	8
Selat	8	7	8	7	8	8
Sidemen	10	9	10	9	10	10
Rendang	6	6	6	6	6	6
Abang	14	12	14	12	14	14
Kubu	9	9	9	9	9	9
Jumlah	78	69	78	70	78	78
%	88.46		89.74		100	

- Untuk memberikan fungsi yang semakin optimal, yang harus dilaksanakan adalah penguatan fungsi kelembagaan KIM di Kabupaten. Penguatan fungsi kelembagaan KIM dilakukan dengan melakukan pembinaan yang terus menerus sehingga peran KIM dalam keterbukaan informasi publik saat ini berfungsi optimal. Adapun fungsi KIM dalam hubungannya dengan peningkatan kapasitas informasi di antaranya adalah sebagai berikut.
 - Sebagai wahana informasi antar KIM, KIM dan Pemerintah secara *bottom up* maupun *top down*.
 - Sebagai peningkatan media literasi informasi dilingkungan anggota KIM.
 - Sebagai lembaga kemitraan yang menjembatani informasi pemerintah dan masyarakat dan mengkritisi Informasi yang tidak sesuai dengan norma dan kultur masyarakat

- d. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomis melalui pengelolaan informasi
 - e. Sebagai lembaga yang mengelola informasi, menyebarkan informasi kepada pihak yang berkompeten, mengembangkan kualitas SDM masyarakat di bidang informasi agar menjadi insan informasi yang tangguh dalam melaksanakan pembangunan.
- Sebagai lembaga informasi, eksistensi KIM dipayungi oleh peraturan hukum seperti;
 - (a) PP No. 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah kabupaten/kota,
 - (b) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No.17 Tahun 2009 Tentang Diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, tanggal 17 Maret 2009,
 - (c) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, tanggal 1 Juni 2010. Ketiga peraturan ini pada prinsipnya menegaskan bahwa KIM adalah organisasi informasi yang mandiri dan kreatif yang tumbuh pada setiap daerah dan kiprahnya sangat dibutuhkan dalam membantu kemajuan pembangunan daerah. Walaupun demikian, keberadaan KIM saat ini khususnya di Kabupaten Karangasem belum berjalan secara maksimal.
- Hambatan-hambatan yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi tidak berkembang yang paling dominan adalah berbagai faktor sebagai berikut.
 - 1. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh setiap KIM sehingga segala aktifitas yang akan dilakukan masih tersendat-sendat. Hal ini mempengaruhi keberadaan KIM yang hanya ada nama namun tanpa aktifitas.
 - 2. Organisasi KIM bukanlah bersifat finansial profit sehingga minat masyarakat untuk terlibat dalam KIM masih rendah.
 - 3. Kurangnya motivasi dan dukungan atas pemahaman dan pemanfaatan KIM oleh warga masyarakat. Saat ini warga masyarakat pada setiap desa belum mengetahui tentang keberadaan KIM di wilayahnya masing-masing.
- Pemberdayaan KIM sebagai konsep solusi alternatif mengatasi hambatan informasi pada masyarakat khususnya pada masyarakat pedesaan, di arahkan pada hal-hal sebagai berikut.

1. Melaksanakan pembinaan yang terus-menerus oleh instansi pemerintah kepada KIM. Pembinaan ini diarahkan pada peningkatan kinerja KIM dengan melaksanakan kegiatan dan melaporkannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
2. Meningkatkan kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun sesama KIM untuk dan melaksanakan kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan
3. Fasilitasi oleh pemerintah berupa fasilitas peningkatan kemampuan akses informasi (sarana jaringan dan perangkat komputer).
4. Perlu diupayakan kelompok-kelompok usaha seperti kelompok tani, kelompok ternak, UKM, dan sebagainya sekaligus sebagai KIM. Dengan demikian, peran informasi di lingkup organisasi atau kelompok tersebut amat dibutuhkan yang disertai oleh peran finansial dan dukungan instansi terkait.

Tersebar nya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat

Persentase diseminasi informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan standar SPM dengan target kinerja 12 kali pada setiap indikator kinerja.

- Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/Per/ M.Kominfo /12/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, pada tahun 2014 pemenuhan target SPM belum dapat dicapai secara maksimal. Sesuai dengan target yang ditetapkan sesuai standar SPM dapat disampaikan diantaranya sebagai berikut.
 1. Pelayanan kepada masyarakat melalui media massa (majalah, radio, TV) dengan target 12 kali pertahun telah berhasil dilaksanakan 22 kali dengan rincian; pelayanan majalah 1 kali, pelayanan informasi melalui radio 15 kali, pelayanan informasi melalui televisi 6 kali.
 2. Pelayanan informasi melalui seni pertunjukan rakyat dilaksanakan sebanyak 6 kali.
 3. Media interpersonal melalui sarasehan diseminasi informasi dilaksanakan 2 kali pada momentum Hari Kebangkitan Nasional dan Perayaan Sumpah Pemuda.

4. Media luar ruang sebagai media penyampaian informasi telah berhasil dilaksanakan 21 kali. Secara lengkap, pelayanan SPM dapat disimak dalam tabel berikut.

Media Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional		2010	2011	2012	2013	2014
a.	Media massa (kali/tahun)					
	-Majalah	1	1	1	1	1
	-Radio	-	-	32	25	15
	-Televisi	-	-	6	6	6
b.	Media website/media online (hari/tahun)	180	360	360	180	360
c.	Media tradisional seperti pertunjukan rakyat (kali/tahun)	-	-	3	5	6
d.	Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi. dan lokakarya;	-	1	3	2	2
e.	Media luar ruang:					
	-Buletin	-	-	-	-	
	-Leaflet	-	-	-	-	
	-Booklet	-	-	-	-	
	-Brosur	-	-	-	-	
	-Spanduk	-	-	6	25	17
	-Baliho	-	-	-	-	

- Ketidakselarasan pemenuhan target pada setiap indikator pada hakekatnya disebabkan oleh beberapa hal; keterbatasan anggaran, kebutuhan pelayanan yang mendesak, dan situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan.

Jumlah SOP pengelolaan informasi publik yang diterbitkan dan telah dipedomani sebagai standar pelaksanaan kerja

- Pentingnya informasi publik bagi pengguna memerlukan suatu standar pelayanan agar memudahkan bagi pemberi layanan dalam memberikan pelayanan informasi baik kepada pemerintah, lembaga-lembaga lainnya, maupun masyarakat serta pengguna lainnya. Sesuai dengan target yang ditetapkan, sampai dengan tahun 2014 telah diterbitkan 4 SOP pelayanan informasi publik yang meliputi:
 1. SOP Penyusunan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik,
 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik,
 3. SOP Uji Konsekuensi, dan
 4. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik.

Persentase SKPD yang telah melaksanakan layanan informasi publik yang terukur sesuai dengan pedoman baku

- Target pencapaian pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang terukur sesuai dengan pedoman baku pada setiap SKPD, untuk saat ini belum dapat dilakukan pengukurannya. Hal ini terjadi karena, instrumen atau kebijakan untuk menetapkan seluruh SKPD untuk membuat pelaporan pelaksanaan informasi publik belum ditetapkan pada awal tahun 2014. Sampai tahun 2014 kebijakan terhadap pengelolaan informasi publik sudah dilaksanakan dengan sosialisasi kepada setiap SKPD dan lembaga lainnya mengacu pada Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Selanjutnya dikeluarkan pula kebijakan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 312/HK/2011 Tentang Penetapan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Capaian pelaksanaan pelayanan informasi pada setiap SKPD baru akan dapat dilihat jika seluruh SKPD sudah menyajikan datanya dalam sebuah laporan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Berdasarkan kondisi faktual yang terjadi saat ini, hambatan-hambatan yang terjadi sehubungan dengan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi adalah sebagai berikut.
 1. Tidak memahami informasi yang dimiliki yang mempengaruhi atau mengakibatkan sulitnya melakukan koordinasi dengan unit kerja yang lain, terlalu bergantung kepada unit lain, dan informasi diklaim rahasia secara sepihak.
 2. Terbatasnya skill, kompetensi, kreatifitas, dan inovasi yang berakibat pada lambat dalam memutakhirkan dan menetapkan informasi publik secara berkala sehingga tidak akan dapat mengembangkan dan mengelola informasi publik.
 3. Mekanisme pelayanan yang buruk akibat dari sikap dan perilaku yang kurang baik.
- Solusi yang harus dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik pada seluruh SKPD pada seluruh badan publik termasuk SKPD di antaranya adalah sebagai berikut.
 - a. Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan informasi pada seluruh badan publik diimbangi dengan pemanfaatan teknologi informasi.

- b. Sumber daya manusia yang mampu menguasai dan memahami informasi pada masing-masing badan publik.
- c. Pemberian anggaran yang memadai untuk segala mekanisme kebutuhan pengelolaan informasi.
- d. Penguatan dan peninjauan kembali dasar hukum pengelolaan informasi sebagai kapasitas legal yang mengikat pada seluruh badan publik.
- e. Mengukur kuantitas pelayanan, penajaman indikator pelayanan informasi publik perlu diukur dengan pengisian matrik rincian pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Sasaran : Meningkatnya fasilitas pengembangan dan pemanfaatan jaringan akses internet

Sasaran ini ditujukan mengukur kemajuan salah satu indikator dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang difasilitasi dengan pemberdayaan teknologi informasi khususnya pemanfaatan akses internet. Model yang dikembangkan adalah perluasan jangkauan jaringan IT sehingga memudahkan dan melancarkan akses internet bagi instansi pemerintah dan masyarakat. Perluasan jangkauan IT ini dimaksudkan untuk memfasilitasi SKPD dalam mengakses kebutuhan informasi, mempermudah akses komunikasi, fasilitas peningkatan kapasitas kerja, pengiriman data *on line*, dan sebagainya.

Jumlah SKPD Pemkab Karangasem yang terkoneksi jaringan internet melalui fasilitas hotspot

- Mengacu target renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah direview kembali pada tahun 2014, perluasan jangkauan SKPD yang terlayani hot spot selama periode renstra ditargetkan mulai pada tahun 2010 sampai tahun 2014. Berikut disajikan fasilitas penyediaan dan pengembangan hot spot di SKPD dari tahun 2011-2015.

Pembangunan Hot spot				
Tahun 2010 (1 unit)	Tahun 2011 (2 unit)	Tahun 2012 (1 unit)	Tahun 2013 (1 unit)	Tahun 2014 (1 unit)
1 Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dinas Pendapatan	1 Bagian Umum	1 Bagian PP	1 Dinas Pariwisata
	2 DPR	2 Bagian Perlengkapan	2 Bagian Ekonomi	2 Kantor Perizinan
		3 Bagian Keuangan		3 Kantor Pol PP

4	Bagian Organisasi	
5	Bagian Tata Pemerintahan	
6	Bagian Kesra	
7	Bagian Ekonomi	
8	Bagian Hukum	

- Berdasarkan fungsi hotspot dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik, perluasan akses ini penting dilakukan secara berkesinambungan sehingga wujud good governance dapat terlaksana dengan baik. Bahwa saat ini manajemen pada semua lini termasuk instansi pemerintah wajib menggunakan elektronik baik dalam bentuk perangkat keras maupun sistem akses. Optimalisasi akses terhadap informasi inilah yang merupakan prinsip dasar dari transparansi yang dituju oleh penggunaan TI di pemerintahan. Electronic-Government.
- Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government merupakan proses transformasi pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Optimalisasi akses terhadap informasi inilah yang merupakan prinsip dasar dari transparansi yang dituju oleh penggunaan TI di pemerintahan termasuk pemerintah Kabupaten Karangasem. Untuk selanjutnya dengan transparansi tersebut maka hal-hal yang disebabkan oleh kekaburan informasi dapat diminimalkan.
- Peningkatan akses melalui hotspot di Kabupaten Karangasem yang masih minim saat ini diharapkan mendapat perhatian dan menjadi arah reformasi birokrasi dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang optimal oleh pemerintah Kabupaten Karangasem. Transformasi birokrasi yang ditawarkan dengan penerapan TI dan prinsip-prinsip e-governmentnya adalah TI diharapkan dapat merubah wajah birokrasi di Kabupaten Karangasem yang sudah ada dengan menawarkan berbagai konsep disertai dengan peningkatan kapasitas anggaran yang memadai. Hal ini disebabkan karena aplikasi teknologi Informasi dalam *e-government* menawarkan suatu proses kerja yang bisa memotong mekanisme antar fungsi organisasi

(*processes cut across organizational function*) bahkan sampai ke eksternal organisasi. Eliminasi sekat-sekat birokrasi yang ada perlu dilakukan agar kekakuan dalam penerapan tupoksi yang ada didalam birokrasi dapat dihindari.

- Berbagai kendala yang dihadapi dan ditemui dalam peningkatan pelayanan akses informasi melalui hotspot di antaranya adalah sebagai berikut.
 1. Akses yang diterima cenderung kurang maksimal disebabkan oleh tingkat pengguna akses tidak diimbangi dengan peralatan yang memadai.
 2. Peningkatan kapasitas layanan (peningkatan bandwidth) belum didukung anggaran yang ada.
- Solusi alternatif yang harus segera dilakukan diantaranya adalah; (a) dukungan pemegang kebijakan terhadap pentingnya infrastruktur jaringan dalam memfasilitasi kinerja instansi pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat yang berbasis IT, (b) dukungan kebijakan tersebut akan berimbas pada penyediaan anggaran yang memadai, (c) mewajibkan kepada seluruh SKPD untuk membangun hotspot dilingkungan kerjanya.

Sasaran : Meningkatnya kualitas konten layanan informasi kepada masyarakat berbasis web

Persentase SKPD pemerintah daerah yang memiliki website informatif sesuai acuan standar

- Dalam membangun pemerintahan berbasis teknologi, Website Kabupaten Karangasem dengan domain www.karangasemkab.go.id saat ini telah pula dikembangkan dalam usaha untuk menyelenggarakan layanan informasi. Mengacu pada ketentuan nama domain website pemerintah (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/Per/M.Kominfo/9/2006 Tentang Penggunaan Nama domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah, maka seluruh SKPD harus menggunakan nama domain resmi (domain go.id). sampai tahun 2014, SKPD yang telah memiliki website sesuai acuan standar sebagai berikut.

No.	Nama website	SKPD Pengguna	Keterangan
1	www.karangasemkab.go.id	Pemkab Karangasem	Web resmi Pemkab Karangasem
2	diskominfo@karangasemkab.go.id	Diskominfo	Subdomain
3	dprd@karangasemkab.go.id	DPRD	Subdomain

4	pendidikan@karangasemkab.go.id	Dinas Pendidikan	Subdomain
5	tourism@karangasemkab.go.id	Dinas Pariwisata	Subdomain
6	kppt@karangasemkab.go.id	Kantor Perijinan dan Pelayanan Terpadu	Subdomain
7	jdih@karangasemkab.go.id	Bagian Hukum	Subdomain
8	pengaduan@karangasemkab.go.id	Diskominfo	Subdomain
9	lpse@karangasemkab.go.id	Diskominfo	Subdomain

- Data di atas menggambarkan bahwa sampai tahun 2014, website SKPD yang telah menggunakan domain resmi dan menjadi subdomain website resmi Pemkab Karangasem barulah sekitar 12% dari total jumlah SKPD. Ke depan, langkah untuk penataan nama domain resmi akan dilanjutkan sehingga seluruh domain SKPD telah menjadi bagian/link ke website resmi Pemkab Karangasem. SKPD yang sudah memiliki subdomain website pemerintah daerah ini adalah sebagai berikut.
- Berdasarkan arah peningkatan reformasi birokrasi dan dicirikan oleh keterbukaan informasi, dominasi teknologi dalam kinerja birokrasi, efisiensi dan transparansi kebijakan pemerintah, maka komunikasi data dan penyediaan data secara cepat dapat diakses melalui website. Website juga menjanjikan transparansi dan bisa dilihat dan diakses oleh pengguna termasuk seluruh lapisan masyarakat. Secara umum, fungsi website adalah sebagai berikut.
 1. Website sebagai tempat untuk mendapatkan informasi dan berinteraksi. Website bisa digunakan sebagai dijadikan sebagai sarana interaksi antar sesama *netter* (pengguna internet). Melalui website, pengguna bisa memperoleh informasi yang akurat dan tepat karena di dalam website biasanya terdapat informasi yang sedang dicari.
 2. Mempermudah komunikasi. Mempermudah komunikasi berarti orang yang mempunyai website tersebut memanfaatkan website untuk berkomunikasi dengan para pelanggan dan orang yang ingin mendapatkan informasi dari pemilik website. Perusahaan ataupun perorangan bisa menjalin komunikasi melalui email ataupun informasi kontak yang ada pada website. Komunikasi melalui website akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan tidak adanya suatu website. Walaupun adanya perbedaan lokasi sangat jauh dan sudah tentu lebih efisien dalam hal biaya dan waktu.
 3. Sarana untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi. Dengan adanya website, pesan dan informasi bisnis dapat disampaikan lebih mudah, cepat dan

up to date. Cukup dengan menulis dan memosting hal-hal yang diinginkan pada website ingin untuk mengetahui informasi atau pesan informasi.

4. Menghemat biaya dalam komunikasi. Informasi mengenai produk baru dan pesan yang disampaikan kepada orang lain dapat secara mudah bisa dikirim kepada pelanggan atau orang yang menginginkan melalui email dan website.
 5. Website dapat digunakan sebagai sarana untuk promosi dari suatu perusahaan atau perorangan yang menjalankan bisnis online. Mempunyai website di internet dapat memperluas jaringan promosi sebuah perusahaan atau bisnis yang sedang Anda jalankan saat ini.
- Adapun hambatan pengembangan website sebagaimana hambatan dalam pengembangan elektronik government di Kabupten Karangasem adalah sebagai berikut.
 1. Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar *software engineering*.
 2. Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Jarangnya SDM yang handal di bidang teknologi informasi di Kabupaten Karangasem sangat menghambat implementasikan *e-government*.
 3. Kemampuan anggaran yang minim serta infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. .
 4. Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi (access point) jumlahnya juga masih terbatas.

Jumlah pengaduan informasi publik oleh masyarakat yang terakomodasi di website pemerintah yang ditindaklanjuti

- Website pemerintah Kabupaten Karangasem mulai tahun 2014 menyediakan fasilitas penanganan pengaduan oleh masyarakat. Di antara beberapa komentar yang masuk ke website Pemkab Karangasem, selanjutnya diverifikasi dan diidentifikasi terhadap beberapa pertanyaan yang memerlukan tindak lanjut oleh SKPD terkait. Setelah diidentifikasi, terdapat 7 permasalahan di sekitar kebijakan publik untuk kemudian telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Jumlah fasilitasi layanan internet sehat dan edukatif kepada masyarakat.

- Pemberian layanan internet kecamatan sesuai dengan indikator pada RPJMD pelaksanaannya pada tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Indikator	Target	Realisasi	%capaian
Persentase lokasi (desa/sekolah) di kecamatan yang mendapat layanan MPLIK	65,28%	61,11%	93,61%
Jumlah lokasi yang dikunjungi tahun 2012	22 lokasi	22 lokasi	100%
Jumlah lokasi yang dikunjungi tahun 2013	25 lokasi	22 lokasi	88%
Jumlah lokasi yang dikunjungi tahun tahun 2014	20 lokasi	18 lokasi	90%

- Pemberian layanan internet kepada masyarakat merupakan media untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan informasi berbasis elektronik. Internet merupakan bagian integral dari sisi kemajuan penyediaan teknologi informasi bagi masyarakat sehingga perlu disosialisasikan, difasilitasi, dan diberikan arahan terhadap cara berinternet, cara internet sehat, dan mengakses informasi di dunia maya. Pada era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Untuk itu, pelayanan internet kepada masyarakat adalah media strategis berupa perangkat media yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses perkembangan informasi publik, mudah dan murah dapat di jangkau ekonomi masyarakat secara luas, sehingga mendapat manfaat pembangunan informasi penting dalam kebutuhan hidup bermasyarakat pada umumnya.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan melihat kondisi faktual ditemukan masih adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan layanan internet. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pemberian layanan internet antara lain sebagai berikut.
 1. Lokasi daerah yang belum merata terdapat signal internet terutama masyarakat yang berlokasi di area blankspot.
 2. Tata bentang alam yang berbukit-bukit ditengarai menyulitkan kegiatan untuk membawa seluruh perangkat layanan internet.
 3. Belum optimalnya pemahaman para pimpinan wilayah kecamatan terhadap manfaat internet.

- Solusi yang ditawarkan untuk penyelesaian hambatan ini meliputi beberapa hal, di antaranya; (1) penyediaan layanan akses internet di seluruh wilayah dengan kajian untuk mengurangi area blankspot, (2) para pimpinan wilayah di kecamatan baik kepala dusun, kepala desa, maupun camat terdapat koordinasi yang padu terhadap manfaat layanan internet. Melalui solusi ini, diharapkan dari tahun-ke tahun masyarakat akan mengerti dan merasakan manfaat internet.

Sasaran : Meningkatnya efisiensi, transparansi, persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik

Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui *electronic processing (e-proc)*

Indikator	Target	Realisasi	%capaian
Persentase paket pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui e-proc.	100%	78,82%	78,82%

- Jumlah paket pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas 200 juta tahun 2014 adalah sebanyak 170 paket dan dari total jumlah tersebut diproses melalui e-proc adalah 134 paket. *Elektronik Processing* menace pada Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bahwa agar pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, diperlukan perencanaan, pengembangan dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara

berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi. Dengan penekanan pada prinsip-prinsip tersebut, pengadaan barang dan jasa secara elektronik sangatlah ideal dan hal ini diperkuat dengan pasal 131 Inpres Nomor 131 tahun 2014 yang menegaskan instansi pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa melalui elektronik.

- Pelaksanaan elektronik processing baru bisa terlaksana pada tahun 2013 dengan realisasi 10 paket atau 7,63% dari target. Pada tahun 2014, realisasi ini kemudian jauh meningkat dengan terealisasinya pemasukan paket lelang melalui e-proc sebesar 134 paket jika dibandingkan dengan paket lelang yang datanya masuk ke Bagian Pengendalian Pembangunan sebanyak 170 paket.

Indikator	2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase paket pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui e-proc.	10 paket	9 paket (7,63%)	100%	134 paket (78,82%)

- Pada tahun anggaran sebelumnya dan mekanisme pengadaan yang masih manual, tingkat efisiensi sangat kecil yang dimungkinkan oleh faktor kebijakan, persaingan yang kurang sehat antar penyedia, penyedia barang/jasa dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, mekanisme pengadaan manual yang riskan terhadap intervensi sehingga mematikan persaingan usaha. Kecendrungan faktor-faktor itu jelas berpengaruh pada pemborosan anggaran pemerintah sehingga target pembangunan yang berpihak pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dinilai belum optimal.
- Secara menyeluruh, manfaat LPSE adalah; **pertama**, , menyehatkan proses demokratisasi dengan akuntabilitas dan transparansi. Melalui LPSE masyarakat bisa melihat, ikut serta sebagai penyedia, ataupun mengawasi akuntabilitas proses jalannya pengadaan barang/jasa pemerintah karena semuanya tercatat secara elektronik. **Kedua**, efektifitas yang lebih baik dan mudah dibandingkan melakukan pelelangan secara manual. **Ketiga** adalah efisiensi atau penghematan anggaran yang lebih baik.

Sasaran: Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa

Sasaran ini menggambarkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam usaha memantapkan peningkatan pelayanan informasi melalui penyediaan infrastruktur

telekomunikasi. Usaha ini dimulai melalui analisis data di lapangan, penyiapan peralatan, serta penertiban regulasi untuk mengatur lalu lintas telekomunikasi. Hasil yang diperoleh atas infrastruktur telekomunikasi nantinya diharapkan bisa membantu masyarakat dan pemerintah dalam hal pengaturan usaha barang dan jasa dalam bidang ekonomi dan percepatan akses saluran informasi.

Persentase menara telekomunikasi yang layak memberikan akses telekomunikasi dengan baik kepada masyarakat dan pengguna sesuai peraturan yang berlaku

- Telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi pembangunan sektor lain di antaranya sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Namun dalam pengembangan sektor telekomunikasi daerah memerlukan pembangunan fasilitas infrastruktur yang memadai yang tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri tanpa dukungan dan partisipasi pihak lain, dalam hal ini pihak swasta. Dalam peningkatan kualitas layanan komunikasi kepada pengguna telepon seluler mutlak membutuhkan keberadaan beberapa infrastruktur penting.
- Salah satu diantara infrastruktur tersebut adalah *base transceiver station* (BTS) atau *radio base station* (RBS) yaitu tower/menara telekomunikasi Pemancar yang berfungsi mengirim dan menerima sinyal/frekuensi pada kawasan tertentu dan menghubungkan dengan kawasan lain. Indikator dan capaian kinerja pada tahun sampai tahun 2014 dengan pengukuran kinerja yang telah ditentukan dapat digambarkan sebagai berikut.

Indikator	Target	Realisasi	%capaian	Realisasi			
				2011	2012	2013	2014
Jumlah menara telekomunikasi yang dimonitoring oleh Tim Monitoring Kabupaten Karangasem	90	90	100%	82	85	91	90
Kepemilikan izin pada setiap menara	90	90	100%	82	85	91	90
Jumlah laporan hasil monev	1	1	1	1	1	1	1

- Data di atas menunjukkan penurunan jumlah menara pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 karena 1 menara milik PT Indosat di Padang Bai bergabung untuk menjadi menara bersama. Selanjutnya untuk komposisi jumlah menara dan BTS perkecamatan dari 2012 sampai dengan 2014.

No.	Tahun 2012			Tahun 2013		Tahun 2014	
	Jumlah menara dan BTS			Jumlah menara dan BTS		Jumlah menara dan BTS	
	Kecamatan	Jml Menara	Jumlah BTS	Jml Menara	Jumlah BTS	Jml Menara	Jumlah BTS
	Manggis	9	16	9	16	9	16
	Karangasem	21	33	27	33	27	33
	Bebandem	5	8	6	8	6	8
	Selat	6	9	6	9	6	9
	Sidemen	6	10	6	10	6	10
	Abang	11	16	13	16	13	16
	Rendang	13	22	13	22	13	22
	Kubu	11	18	11	18	11	18
	Jumlah	82	132	90	132	90	131

- Untuk mengantisipasi pertumbuhan menara yang terus meningkat dan memenuhi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2009 tentang Pembangunan Menara Bersama, maka pembangunan menara harus memenuhi kajian tata ruang dan penetapan *zona existin menara*. Sesuai dengan geografis wilayah, di Kabupaten Karangasem sampai saat ini terdapat 51 titik zona menara. Hal ini disesuaikan dengan keberadaan *zona existing* yang ditetapkan. Keadaan wilayah yang memiliki pegunungan dan perbukitan pada setiap daerah akan berpengaruh pada semakin banyaknya *zona existing* yang ditetapkan. Zona existing merupakan titik yang ada pada suatu wilayah yang memungkinkan dibangunnya menara telekomunikasi. Penetapan *zona existing* ini adalah sejalan dengan usaha pemerintah untuk mengatur keberadaan menara yang semakin hari terus menjamur, dan jika dibiarkan maka hal ini akan merusak tata ruang suatu wilayah.
- Sebagai tindak lanjut peraturan dari pemerintah pusat dan untuk mengatur penertiban menara telekomunikasi, perlu dikeluarkan kebijakan dari pemerintah daerah. Maka dikeluarkanlah Peraturan Bupati Karangasem Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama yang diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama. Sebagai tindak lanjut dalam penetapan retribusi daerah terhadap keberadaan menara

telekomunikasi, maka ditetapkan Perda Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Persentase penanganan pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi pembangunan menara telekomunikasi

- Untuk memenuhi regulasi menara telekomunikasi sejalan dengan kebijakan yang dilaksanakan, Tim Monitoring Penertiban Menara Telekomunikasi yang terdiri atas beberapa instansi terkait telah melakukan tugasnya ke lapangan dengan baik. Regulasi yang harus dipenuhi di antaranya adalah izin pendirian menara yang menyangkut IMB, HO, UKL, UPL. Terhadap pengecekan kelengkapan data-data pendirian menara, pada prinsipnya semua menara telekomunikasi sampai tahun 2014 sudah memiliki izin yang masing-masing kelengkapannya diproses oleh instansi terkait.

Persentase radio pancar ulang (repeater) yang layak memberikan akses telekomunikasi dengan baik

- Radio pancar ulang (repeater) yang ada di Kabupaten Karangasem yang berfungsi memberikan akses telekomunikasi sampai tahun 2014 ada 3 unit yang terletak ditiga lokasi, yaitu di Bukit Sega Kecamatan Abang, Pasar Agung Kecamatan Selat dan Repeater di Padang Bai Kecamatan Manggis. Repeater akan sangat membantu pemerintah dan masyarakat dalam berkomunikasi terutama dalam melaksanakan pembangunan daerah. Masyarakat sebagai penentu keberhasilan pembangunan dan perannya sebagai penerima sekaligus pengontrol pelaksanaan pembangunan, maka akses telekomunikasi sangat penting. Ke depan penting untuk ditambah sarana penambahan repeater terutama pada daerah yang blankspot di seluruh desa di Kabupaten Karangasem.

3.3 Pendorong Keberhasilan, Kendala/Hambatan, dan Pemecahan Masalah

Secara umum, pencapaian indikator sasaran pada tahun anggaran 2014 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Dari keseluruhan kegiatan, capaian target indikator kinerja sudah memuaskan atau target capaian secara persentase di atas 80% setiap indikator. Namun demikian, faktor ini juga dapat didukung oleh

beberapa faktor yang mendukung keberhasilan serta tidak luput dari beberapa kelemahan.

a. Faktor Pendorong Keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator kinerja sesuai dengan penetapan kinerja pada tahun anggaran 2014 secara umum disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan kegiatan. Komitmen yang kuat akan melahirkan tanggungjawab yang besar, tanggungjawab kepada atasan dan tanggungjawab kepada masyarakat sebagai publik yang harus dilayani.
2. Dukungan dari instansi lintas sektoral dan masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama yang baik pada tingkat penyelenggara kegiatan baik dalam lembaga formal pemerintah sebagai pelaksana kegiatan, dan pihak swasta serta masyarakat memudahkan dalam melaksanakan kegiatan.
3. Skala atau pengaturan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan bisa berjalan sesuai rencana seperti yang dituangkan dalam matrik pelaksanaan kegiatan. Matrik pelaksanaan kegiatan pada masing-masing unit kerja sudah merupakan sinkronisasi menyeluruh antar bidang sehingga memungkinkan kerjasama yang baik dan konsentrasi dalam melaksanakan kegiatan.

b. Faktor Kelemahan, Kendala/Hambatan

Dalam melaksanakan kegiatan ada beberapa kelemahan, kendala atau hambatan yang dialami seperti beberapa hal di bawah ini.

1. Kualitas SDM yang masih lemah di beberapa lini yang disebabkan oleh pengalaman kerja yang minim atau sfesifikasi pendidikan yang kurang tepat.
2. Belum terpenuhinya jabatan eselon yang ada khususnya pada eselon IV pada masing-masing unit kerja yang berpengaruh pada lemahnya pencapaian kinerja.
3. Dukungan anggaran yang tidak tetap atau pasang surut, sehingga beberapa indikator kinerja utama tidak bisa berjalan setiap tahun. Hal ini menyebabkan tertundanya target pencapaian kegiatan.
4. Pemasangan indikator sasaran yang tidak terukur pada beberapa unit kerja. Kelemahan ini menyebabkan pemasangan target tidak bisa terukur secara tepat, baik dalam kurun waktu tahun anggaran bersangkutan ataupun target dalam waktu kedepan. Kelemahan ini juga akan merembet pada lemahnya akuntabilitas yang harus dilaporkan kepada pihak terkait.

c. Pemecahan Masalah

Beberapa kelemahan tersebut jalan keluarnya adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas SDM. Hal ini bisa ditempuh dengan jalan rekrutmen PNS sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan dan bisa dengan memberi kesempatan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Di samping itu, pemutasian pegawai harus benar-benar diperhatikan sehingga pegawai yang sudah pengalaman dan kemampuan yang sangat dibutuhkan tidak dipindahkan.
2. Terpenuhiya kapasitas struktur jabatan eselon sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
3. Melakukan lobi kepada instansi terkait agar diberikan dukungan anggaran yang memadai. Untuk melakukan hal ini, maka diperlukan paparan dan argumentasi terhadap kegiatan serta penganggaran yang dibuat.
4. Unit kerja seperti pada sekretariat dan bidang-bidang sebagai pelaksana teknis kegiatan harus mengerti tentang pemasangan tolak ukur kegiatan yang mengacu pada RPJMD, rencana strategis instansi, yang kemudian dituangkan dalam penyusunan rencana kerja dan dokumen penganggaran.

4.4 Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan utama tersebut di atas, ditunjang dengan jumlah dana yang dianggarkan oleh SKPD dalam APBD Kabupaten Tahun 2014 termasuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta realisasinya dapat disimak dalam data berikut.

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	Pendapatan			
	1. Pendapatan Asli Daerah	800.000.000	815.998.254	102,00%
	Total Pendapatan	800.000.000	815.998.254	102,00%
B	Belanja			
	1. Belanja Tidak Langsung	2.066.736.994	1.897.078.270	91,79%
	2. Belanja Langsung	1.791.480.000	1.723.468.240	96,20%
	a. Belanja Pegawai	164.930.700	155.948.000	94,55%
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.155.128.800	1.118.013.740	96,79%

	c. Belanja Modal	471.420.500	449.506.500	95,35%
C	Total Belanja	3.858.216.994	3.620.546.510	93,84%
	Surplus/Defisit	3.858.216.994	2.804.548.256	72,69%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada masing-masing belanja baik belanja langsung maupun tidak langsung realisasinya tidak terpenuhi 100%. Hal ini disebabkan oleh terjadinya efisiensi pada setiap kegiatan serta perencanaan penganggaran pada unit kerja yang tidak tepat.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan anggaran pada tahun 2014 dicerminkan oleh meningkatnya indikator kinerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu yang menjadi identitas dan kebutuhan yang sangat urgen adalah kemajuan dalam pelaksanaan elektronik government sebagai alat peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Relevansi antara keterbukaan informasi publik yang wajib dilaksanakan sangat sinergis dengan sarana pemakaian IT seperti tersedianya sistem informasi berbasis web, pelayanan akses internet melalui perluasan hotspot area, peningkatan sarana akses pengguna telepon seluler yang legal disertai dengan peningkatan retribusi yang sangat signifikan, dan yang paling menggembirkan adalah keberhasilan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui *e-proc*. Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2014 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta staf dalam upaya meningkatkan kinerja. Selain itu, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2014 ini.

Tetapi di samping keberhasilan yang telah dilaksanakan, dalam meningkatkan kinerja organisasi pada saat ini terdapat kelemahan-kelemahan yang sangat mempengaruhi terhambatnya kemajuan dari sisi peningkatan kinerja. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Kualitas SDM yang masih lemah di beberapa lini yang disebabkan oleh pengalaman kerja yang minim atau sfesifikasi pendidikan yang kurang tepat.
2. Belum terpenuhinya jabatan eselon yang ada khususnya pada eselon IV pada masing-masing unit kerja yang berpengaruh pada lemahnya pencapaian kinerja.
3. Dukungan anggaran yang tidak tetap atau pasang surut, sehingga beberapa indikator kinerja utama tidak bisa berjalan setiap tahun. Hal ini menyebabkan tertundanya target pencapaian kegiatan.
4. Pemasangan indikator sasaran yang tidak terukur pada beberapa unit kerja. Kelemahan ini menyebabkan pemasangan target tidak bisa terukur secara tepat, baik dalam kurun waktu tahun anggaran bersangkutan ataupun target dalam waktu kedepan. Kelemahan ini juga akan merembet pada lemahnya akuntabilitas yang harus dilaporkan kepada pihak terkait.

Pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut yang perlu mendapat perhatian serius dalam meningkatkan kinerja adalah menyangkut beberapa hal berikut.

5. Peningkatan kualitas SDM. Hal ini bisa ditempuh dengan jalan rekrutmen PNS sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan dan bisa dengan memberi kesempatan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Di samping itu, pemutasian pegawai harus benar-benar diperhatikan sehingga pegawai yang sudah pengalaman dan kemampuan yang sangat dibutuhkan tidak dipindahkan.
6. Terpenuhiya kapasitas struktur jabatan eselon sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
7. Melakukan lobi kepada instansi terkait agar diberikan dukungan anggaran yang memadai. Untuk melakukan hal ini, maka diperlukan paparan dan argumentasi terhadap kegiatan serta penganggaran yang dibuat.
8. Unit kerja seperti pada sekretariat dan bidang-bidang sebagai pelaksana teknis kegiatan harus mengerti tentang pemasangan tolak ukur kegiatan yang mengacu pada RPJMD, rencana strategis instansi, yang kemudian dituangkan dalam penyusunan rencana kerja dan dokumen penganggaran.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka dukungan dari para pemegang kebijakan sangat diperlukan. Pemerintah daerah harus serius dan memfokuskan perhatiannya pada sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan teknologi informasi. Walaupun pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik sudah berjalan secara signifikan, tetapi aspek untuk mewujudkan *electronic government* di Kabupaten Karangasem masih banyak yang harus dikerjakan. Pada sisi kualitas SDM, perlu diperhatikan kualifikasi pendidikan yang berhubungan dengan komunikasi dan informatika.

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.Gde Ngurah Yudiantara, M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Wayan Geredeg
Jabatan : Bupati Karangasem
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amlapura, 13 Januari 2014

Pihak Kedua
Bupati Karangasem,

Pihak Pertama
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem,

I Wayan Geredeg

Ir. Gde Ngurah Yudiantara, M.M.
Nip. 19630929 198903 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Ngurah Rai No. 29 Telp. (0363) 21037
AMLAPURA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 7/DKI/ 2014
TENTANG
REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renja-SKPD atau Rencana Kinerja Tahunan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengukuran pencapaian kinerja dalam anggaran perubahan, maka dipandang perlu untuk merevisi Rencana Kinerja Tahunan
- c. Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem tentang Revisi Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2014

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4548).

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem tentang Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2014

KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2014 sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Rancangan Rencana Kinerja Tahunan ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Amlapura

Pada tanggal : 25 September 2014

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGASEM,



Ir. GDE NGURAH YUDIANTARA, M.M.
NIP. 19630929 198903 1 016

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 7/DKI/2014

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Anggaran : 2014

No.	Arah Kebijakan RPJMD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Optimalisasi Layanan Komunikasi dan Informasi Serta Pendaayagunaannya Bagi Pemerintah dan Masyarakat	Meningkatnya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) sebagai mitra penyebar informasi	Persentase Desa di Kabupaten Karangasem yang telah membentuk Lembaga Kelompok Informasi Masyarakat	78 KIM
2	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Untuk Mencapai Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik	Tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat	Persentase layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan standar SPM	100%
			Jumlah SOP pengelolaan informasi publik yang diterbitkan dan telah dipedomani sebagai standar pelaksanaan kerja	4 SOP
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan layanan informasi publik yang terukur sesuai dengan pedoman baku	25%
3	Meningkatnya Sistem Jaringan di Segala SKPD Untuk Menciptakan Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Secara Koneksitas dan Peningkatan Pemanfaatan Media Internet Yang Lebih Luas di Masyarakat	Meningkatnya fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan jaringan akses internet	Jumlah SKPD Pemkab Karangasem yang terkoneksi jaringan internet melalui fasilitasi hotspot	1 SKPD
		Meningkatnya kualitas konten layanan informasi kepada masyarakat berbasis web	Persentase SKPD pemerintah daerah yang memiliki website informatif sesuai acuan standar	10 SKPD (24% dari 41 SKPD)
			Persentase pengaduan informasi publik oleh masyarakat yang terakomodasi di website pemerintah yang ditindaklanjuti	100%

			Jumlah fasilitasi layanan internet sehat dan edukatif kepada masyarakat	20 kali
		Meningkatnya efisiensi, transparansi, persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui electronic processing	100%
4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa	Persentase menara telekomunikasi yang layak memberikan akses telekomunikasi dengan baik kepada masyarakat dan pengguna sesuai peraturan yang berlaku	100%
			Persentase penanganan pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi pembangunan menara telekomunikasi	100%
			Persentase radio pancar ulang (repeater) yang layak memberikan akses telekomunikasi dengan baik	100%

Amlapura, 25 September 2014

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem,



Ir. Gde Nurah Yudiantara, M.M.
NIP. 19630929 198903 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ngurah Rai No. 29 Telp. (0363) 21037

AMLAPURA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 6/DKI/2014

TENTANG

REVIUI INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2014

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mencapai sasaran strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama.
2. Bahwa sehubungan dengan poin 1 di atas perlu ditetapkan Review Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 -2014;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/20/Menpan/11/2008 Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 – 2015.
- Pertama : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 - 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Memerintahkan kepada semua pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amlapura

Pada tanggal : 25 September 2014

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGASEM,



Ir. GDE NGURAH YUDIANTARA, M.M.
NIP. 19630929 198903 1 016

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 6/DKI/2014 tentang Reviu

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2014.

SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan bidang komunikasi dan informatika

Fungsi : Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis urusan sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, pengolahan data elektronik, serta bidang pos dan telekomunikasi

- Membina dan melaksanakan tugas-tugas komunikasi dan informatika meliputi sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, pengolahan data elektronik, serta bidang pos dan telekomunikasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Cara Pengukuran Kinerja	Penanggung jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) sebagai mitra penyebar informasi	Persentase Desa di Kabupaten Karangasem yang telah membentuk Lembaga Kelompok Informasi Masyarakat	KIM merupakan lembaga informasi yang merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi. Bertitik tolak pada periode awal renstra atau pada kurun waktu tahun 2010-2011, setiap desa belum seluruhnya memiliki kelompok informasi. Apalagi jumlah desa semakin berkembang akibat adanya pemekaran desa. Maka pada periode renstra 2011-2015, target awal yang harus dikerjakan adalah pemenuhan pembentukan struktur lembaga informasi di setiap desa. Jika lembaga informasi telah terbentuk secara formal, maka akan memudahkan bagi pemerintah untuk melakukan mitra komunikasi dan diseminasi informasi publik terhadap kebijakan pemerintah, progress pelaksanaan pembangunan, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berdampak positif bagi peningkatan kinerja serta evaluasi kebijakan pemerintah. Pengukuran kinerjanya dilakukan dengan membandingkan jumlah desa di 8 kecamatan dengan ada atau tidaknya lembaga informasi (KIM) pada setiap desa/kelurahan	Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik (Kominfo)	Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik (Kominfo)

		Persentase SKPD yang telah melaksanakan layanan informasi publik yang terukur sesuai dengan pedoman baku	Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan pada setiap SKPD dibuktikan dengan suatu dokumen hasil pelaporan layanan informasi publik sesuai dengan format pedoman yang ditentukan. Layanan informasi publik yang telah dilaksanakan pada setiap SKPD selanjutnya disetor ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Hasil pengukuran kinerjanya dilakukan dengan membandingkan persentase jumlah SKPD yang telah melaksanakan keterbukaan informasi publik berdasarkan laporan layanan informasi yang dibuat dengan jumlah semua SKPD.	Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik (Kominfo)	Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik (Kominfo)
2	Meningkatnya fasilitas pengembangan dan pemanfaatan jaringan akses internet	Persentase SKPD Pemkab Karangasem yang terkoneksi jaringan internet melalui fasilitas hotspot	Hotspot yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan sarana untuk mengakses internet dalam radius tertentu. Satu hotspot bisa diakses oleh lebih dari satu SKPD. Pada tahun 2014 ditargetkan 17% SKPD) dengan rincian 7 SKPD termasuk seluruh unit kerja di Sekretariat Daerah sudah terkoneksi hotspot pemda	Bidang Pengolahan Data Elektronik	Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik (Kominfo)
3	Meningkatnya kualitas konten layanan informasi kepada masyarakat berbasis web	Persentase SKPD pemerintah daerah yang memiliki website informatif sesuai acuan standar	Website dikembangkan untuk setiap SKPD di Kabupaten Karangasem dengan disain dan konten serta domain yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam ranah pengembangan informasi yang bermanfaat, website pada setiap SKPD diarahkan agar mampu mengedukasi penggunaanya disamping memberikan akses informasi up to date dan cepat. Cara pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan jumlah seluruh SKPD dengan SKPD yang telah memiliki domain website sesuai standar yang ditentukan.	Bidang Pengolahan Data Elektronik	Bidang Pengolahan Data Elektronik

		Jumlah fasilitasi layanan internet sehat dan edukatif kepada masyarakat	Semakin meningkatnya masyarakat yang bisa mengakses internet berarti tingkat penyerapan informasi di masyarakat akan semakin tinggi. Untuk pemberian edukasi cara berinternet kepada masyarakat pengguna lainnya yang ada di lokasi perdesaan, maka pemberian layanan internet dengan cara jemput bola ke lapangan mulai dilaksanakan pada tahun 2014. Cara pengukuran kinerja ini dilakukan dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di perdesaan melalui fasilitas yang diberikan. Pemberian fasilitas internet ini diarahkan pada bagaimana cara berinternet sehat dan memiliki nilai edukasi yang mampu mengubah wawasan pengguna.	Bidang Pengolahan Data Elektronik	Bidang Pengolahan Data Elektronik
4	Meningkatnya efisiensi, transparansi, persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui electronic processing	Semakin transparannya pengadaan barang dan jasa melalui elektronik akan semakin meningkatnya tingkat efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah. Sejalan dengan peraturan kewajiban pengadaan barang dan jasa secara elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pada tahun 2014 LPSE Kabupaten Karangasem telah melaksanakan lelang perdana. Cara pengukuran kinerjanya adalah jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik pada tahun 2014 dibagi dengan jumlah paket pengadaan barang dan jasa di atas nominal 200.000.000,- pada tahun 2014.	Bidang Pengolahan Data Elektronik	Bidang Pengolahan Data Elektronik
5	Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa	Persentase menara telekomunikasi yang layak memberikan akses telekomunikasi dengan baik kepada masyarakat dan pengguna sesuai peraturan yang berlaku	Saat memasuki era teknologi informasi dan komunikasi digital, manfaat menara telekomunikasi akan berdampak pada kenyamanan akses komunikasi melalui media seluler maupun media lainnya. Tetapi di sisi yang sama, keberadaan menara telekomunikasi juga patut ditata serta wajib memiliki segala kelengkapan administrasi khususnya segala bentuk izin yang diwajibkan. Jika kelengkapan izin telah dimiliki dan menaati segala peraturan lainnya yang telah ditetapkan, maka barulah menara telekomunikasi tersebut diperbolehkan beroperasi termasuk dalam jasanya memberikan akses telekomunikasi. Pengukuran kinerjanya adalah menghitung jumlah menara yang telah beroperasi berdasarkan izin serta layak memberikan akses telekomunikasi.	Bidang Pos dan Telekomunikasi	Bidang Pengolahan Data Elektronik

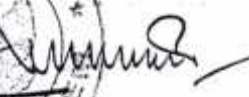
PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2014

Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Anggaran : 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Tercapainya peran-peran aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi edukatif	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelembagaan KIM	100%	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan pengembangan kemitraan dengan lembaga komunikasi sosial dan lembaga komunikasi pemerintah	30.000.000
		Jumlah peserta yang diberikan sosialisasi pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi	150 orang	Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	25.000.000
		Persentase desa yang dilayani informasi melalui media kesenian rakyat	38,46%	Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Penyebarluasan informasi publik melalui media cetak, elektronik, pertunjukan seni tradisional, sarasehan, pameran dan dialog publik	180.000.000
	Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, beradab, produktif, berdaya saing, dan cinta tanah air.	Persentase informasi yang disiarkan melalui dialog radio dan pesan layanan informasi	35,38%	Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Penyebarluasan informasi publik melalui media cetak, elektronik, pertunjukan seni tradisional, sarasehan, pameran dan dialog publik	
		Jumlah peserta sarasehan wawasan kebangsaan	100 orang	Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Penyebarluasan informasi publik melalui media cetak, elektronik, pertunjukan seni tradisional, sarasehan, pameran dan dialog publik	
		Jumlah majalah informasi yang disebarakan	225 eksemplar	Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Peningkatan Pelayanan Informasi Pembangunan Daerah	20.000.000

Meningkatnya pengembangan infrastruktur jaringan teknoogi informasi	Persentase pengembangan jaringan hotspot pada SKPD	22,22%	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	25.000.000
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat	Jumlah website terpelihara	3 unit	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Pemeliharaan dan pengembangan website	30.000.000
	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui e-proc	50%	Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Layanan Pengadaan barang dan Jasa Secara Elektronik	310.000.000
	Persentase lokasi (desa/sekolah) yang mendapat layanan MPLIK	34,72%	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	40.000.000
Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika	Jumlah SDM yang dilatih IT	55 orang	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	40.000.000
Meningkatnya masyarakat yang terjangkau layanan telekomunikasi	Jumlah menara telekomunikasi yang memberikan akses telekomunikasi	91 menara	Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Telekomunikasi	50.000.000
	Jumlah repeater yang memberikan akses telekomunikasi	3 unit	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Biaya Jasa Pemeliharaan Repeater	50.000.000
Terselenggaranya layanan pos yang informatif, efektif, dan efisien	Jumlah peserta yang diberikan sosialisasi pos	40 orang	Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Penyebarluasan informasi pelayanan pos perdesaan melalui sosialisasi	20.000.000
Jumlah Anggaran					820.000.000

Amlapura, 13 Januari 2014

Pihak Kedua
Bupati Karangasem,

I Wayan Geredeg

Pihak Pertama
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem,

Gde Nizarah Yudiantara, M.M.
NIP. 19630929 198903 1 016

Laporan realisasi kinerja semester I 2014
 Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Tahun Anggaran : 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Tercapainya peran-peran aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi edukatif	Jumlah KIM terbina	78 KIM	-	0%	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan pengembangan kemitraan dengan lembaga komunikasi sosial dan lembaga komunikasi pemerintah	30.000.000	9.509.600	31,70
		Jumlah peserta tersosialisasi pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi	150 orang	150 orang	100%	Kerjasama Informasi degan Mass Media	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	25.000.000	14.121.500	56,49
		Jumlah desa yang dilayani informasi melalui media kesenian rakyat	5 desa/lokasi	-	0%	Kerjasama Informasi degan Mass Media	Penyebarluasan informasi publik melalui media cetak, elektronik, pertunjukan seni tradisional, sarasehan, pameran dan dialog publik	180.000.000	72.236.250	40,13
	Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, beradab, produktif, berdaya saing, dan cinta tanah air.	Jumlah pelaksanaan dialog interaktif	14 kali	6 kali	43%	Kerjasama Informasi degan Mass Media	Penyebarluasan informasi publik melalui media cetak, elektronik, pertunjukan seni tradisional, sarasehan, pameran dan dialog publik			
		Jumlah pesan layanan informasi kepada masyarakat		75 kali	-	0%	Kerjasama Informasi degan Mass Media	Penyebarluasan informasi publik melalui media cetak, elektronik, pertunjukan seni tradisional, sarasehan, pameran dan dialog publik		

		Jumlah peserta sarasehan informasi wawasan kebangsaan	100 orang	50 orang	50%	Kerjasama Informasi degan Mass Media	Penyebarluasan informasi publik melalui media cetak, elektronik, pertunjukan seni tradisional, sarasehan, pameran dan dialog publik			
		Jumlah penyebaran majalah informasi	215 eksemplar	-	0%	Kerjasama Informasi degan Mass Media	Peningkatan Pelayanan Informasi Pembangunan Daerah	20.000.000	-	-
	Meningkatnya pengembangan infrastruktur jaringan teknoogi informasi	Jumlah SKPD terpasangi jaringan	8 SKPD	-	0%	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	25.000.000	541.400	2,17
	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat	Jumlah website terpelihara	3 unit	-	0%	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Pemeliharaan dan pengembangan website	30.000.000	-	-
		Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui e-proc	59%	38%	64%	Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Layanan Pengadaan barang dan Jasa Secara Elektronik	310.000.000	259.830.900	83,82
		Jumlah (desa/sekolah) yang mendapat layanan MPLIK	70 lokasi	15 lokasi	21%	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	40.000.000	13.111.950	32,78
	Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika	Jumlah SDM yang dilatih IT	55 orang	55 orang	100%	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	40.000.000	28.418.800	71,05
	Meningkatnya masyarakat yang terjangkau layanan telekomunikasi	Persentase menara telekomunikasi termonitoring	91 menara	20 menara telekomunikasi	22%	Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Telekomunikasi	50.000.000	18.597.400	37,19
		Jumlah repeater terpelihara	3 unit	3 unit	100%	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Biaya Jasa Pemeliharaan Repeater	50.000.000	46.061.250	92,12

Terselenggaranya layanan pos yang informatif, efektif, dan efisien	Jumlah peserta yang diberikan sosialisasi pos	40 orang	0%	0%	Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Penyebarluasan informasi pelayanan pos perdesaan melalui sosialisasi	20.000.000	1.489.400	7,45
Jumlah Anggaran							820.000.000	463.918.450	56,58

Amlapura, 30 Juni 2014

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem



Ir. Gde Ngurah Yudiantara, M.M
Nip. 19630929 198903 1 016

PENETAPAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2014

Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Anggaran : 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatnya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) sebagai mitra penyebar informasi	Persentase Desa di Kabupaten Karangasem yang telah membentuk Lembaga Kelompok Informasi Masyarakat	78 KIM	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Pembinaan Pengembangan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial dan Lembaga Komunikasi Pemerintah	30.000.000
2	Tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat	Persentase layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan standar SPM	100%	Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Penyebarluasan informasi publik melalui media cetak, elektronik, pertunjukan seni tradisional, sarasehan, pameran dan dialog publik	180.000.000
		Jumlah SOP pengelolaan informasi publik yang diterbitkan dan telah dipedomani sebagai standar pelaksanaan kerja	4 SOP			25.000.000
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan layanan informasi publik yang terukur sesuai dengan pedoman baku	25%			
3	Meningkatnya fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan jaringan akses internet	Jumlah SKPD Pemkab Karangasem yang terkoneksi jaringan internet melalui fasilitasi hotspot	1 SKPD	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	41.000.000
4	Meningkatnya kualitas konten layanan informasi kepada masyarakat berbasis web	Persentase SKPD pemerintah daerah yang memiliki website informatif sesuai acuan standar	10 SKPD (24% dari 41 SKPD)		Pemeliharaan dan Pengembangan Website	79.000.000

		Persentase pengaduan informasi publik oleh masyarakat yang terakomodasi di website pemerintah yang ditindaklanjuti	100%			
		Jumlah fasilitasi layanan internet sehat dan edukatif kepada masyarakat	20 kali	Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi		26.000.000
5	Meningkatnya efisiensi, transparansi, persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui electronic processing	100%	Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	451.800.000
6	Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa	Persentase menara telekomunikasi yang layak memberikan akses telekomunikasi dengan baik kepada masyarakat dan pengguna sesuai peraturan yang berlaku	100%	Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Telekomunikasi	50.000.000
		Persentase penanganan pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi pembangunan menara telekomunikasi	100%			
		Persentase radio pancar ulang (repeater) yang layak memberikan akses telekomunikasi dengan baik	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Biaya Jasa Pemeliharaan Repeater	87.680.000
	Jumlah Anggaran					970.480.000

Amlapura, 25 September 2014

Pihak Kedua

Bupati Karangasem,



Wawan Geredeg

Pihak Pertama

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Karangasem,



Ir. Gde Ngurah Yudiantara, M.M.
NIP. 19630929 198903 1 016

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN ANGGARAN 2014

Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Anggaran : 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% (6/5)	Dana		
						Anggaran	Realisasi	% (9/8)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) sebagai mitra penyebar informasi	Persentase Desa di Kabupaten Karangasem yang telah membentuk Lembaga Kelompok Informasi Masyarakat	78 KIM	78 KIM	100%	30.000.000	26.813.450	89,38
2	Tersebar nya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat	Persentase layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan standar SPM	100%	78,33%	78,33%	180.000.000	177.306.100	98,50
		Jumlah SOP pengelolaan informasi publik yang diterbitkan dan telah dipedomani sebagai standar pelaksanaan kerja	4 SOP	4 SOP	100%	25.000.000	24.108.400	96,43
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan layanan informasi publik yang terukur sesuai dengan pedoman baku	25%	Belum dapat dilihat hasilnya	-			
3	Meningkatnya fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan jaringan akses internet	Jumlah SKPD Pemkab Karangasem yang terkoneksi jaringan internet melalui fasilitasi hotspot	1 SKPD	1 SKPD	100%	41.000.000	39.627.000	96,65
4	Meningkatnya kualitas konten layanan informasi kepada masyarakat berbasis web	Persentase SKPD pemerintah daerah yang memiliki website informatif sesuai acuan standar	10 SKPD (24% dari 41 SKPD)	100%	100%	79.000.000	76.074.600	96,30

		Persentase pengaduan informasi publik oleh masyarakat yang terakomodasi di website pemerintah yang ditindaklanjuti	100%	70%	70%			
		Jumlah fasilitasi layanan internet sehat dan edukatif kepada masyarakat	20 kali	18 kali	90,00%	26.000.000	20.948.900	80,57
5	Meningkatnya efisiensi, transparansi, persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui electronic processing	100%	134 paket (78,82%) dari 170 paket	78,82%	451.800.000	437.491.700	96,83
6	Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa	Persentase menara telekomunikasi yang layak memberikan akses telekomunikasi dengan baik kepada masyarakat dan pengguna sesuai peraturan yang berlaku	100%	99,00%	99%	50.000.000	48.153.800	96,31
		Persentase penanganan pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi pembangunan menara telekomunikasi	100%	Tidak ada pelanggaran	-			
		Persentase radio pancar ulang (repeater) yang layak memberikan akses telekomunikasi dengan baik	100%	100%	100%	87.680.000	83.748.328	95,52
	Jumlah Anggaran					970.480.000	934.272.278	96,27%

PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2014

Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Anggaran : 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Realisasi		% (kolom 6/4)
					Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) sebagai mitra penyebar informasi	Persentase Desa di Kabupaten Karangasem yang telah membentuk Lembaga Kelompok Informasi Masyarakat	78 KIM	30.000.000	78 KIM	26.813.450	100,00
2	Tersebar nya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat	Persentase layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan standar SPM	100%	180.000.000	78,33%	177.306.100	78,33
		Jumlah SOP pengelolaan informasi publik yang diterbitkan dan telah dipedomani sebagai standar pelaksanaan kerja	4 SOP	25.000.000	4 SOP	24.108.400	100,00
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan layanan informasi publik yang terukur sesuai dengan pedoman baku	25%		Belum dapat dilihat hasilnya		-
3	Meningkatnya fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan jaringan akses internet	Jumlah SKPD Pemkab Karangasem yang terkoneksi jaringan internet melalui fasilitasi hotspot	1 SKPD	41.000.000	1 SKPD	39.627.000	100,00
4	Meningkatnya kualitas konten layanan informasi kepada masyarakat berbasis web	Persentase SKPD pemerintah daerah yang memiliki website informatif sesuai acuan standar	10 SKPD (24% dari 41 SKPD)	79.000.000	10 SKPD	76.074.600	100,00
		Persentase pengaduan informasi publik oleh masyarakat yang terakomodasi di website pemerintah yang ditindaklanjuti	100%		70%		70,00
		Jumlah fasilitasi layanan internet sehat dan edukatif kepada masyarakat	20 kali	26.000.000	18 kali	20.948.900	90,00

5	Meningkatnya efisiensi, transparansi, persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui electronic processing	100%	451.800.000	134 paket (78,82%) dari 170 paket	437.491.700	78,82
6	Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa	Persentase menara telekomunikasi yang layak memberikan akses telekomunikasi dengan baik kepada masyarakat dan pengguna sesuai peraturan yang berlaku	100%	50.000.000	99%	48.153.800	98,90
		Persentase penanganan pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi pembangunan menara telekomunikasi	100%		Tidak ada pelanggaran		
		Persentase radio pancar ulang (repeater) yang layak memberikan akses telekomunikasi dengan baik	100%	87.680.000	100%	83.748.328	100,00
Jumlah Anggaran				970.480.000		934.272.278	

Amlapura, 2 Maret 2015
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Karangasem,



Ir. Gde Ngurah Yudiantara, M.M.
NIP. 19630929 198903 1 016

REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Anggaran : 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Realisasi		% (kolom 6/4)
					Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) sebagai mitra penyebar informasi	Persentase Desa di Kabupaten Karangasem yang telah membentuk Lembaga Kelompok Informasi Masyarakat	78 KIM	30.000.000	78 KIM	26.813.450	100
2	Tersebar nya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat	Persentase layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan standar SPM	100%	180.000.000	1	177.306.100	78,33
		Jumlah SOP pengelolaan informasi publik yang diterbitkan dan telah dipedomani sebagai standar pelaksanaan kerja	4 SOP	25.000.000	4 SOP	24.108.400	100
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan layanan informasi publik yang terukur sesuai dengan pedoman baku	25%		Belum dapat dilihat hasilnya		-
3	Meningkatnya fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan jaringan akses internet	Jumlah SKPD Pemkab Karangasem yang terkoneksi jaringan internet melalui fasilitasi hotspot	1 SKPD	41.000.000	1 SKPD	39.627.000	100
4	Meningkatnya kualitas konten layanan informasi kepada masyarakat berbasis web	Persentase SKPD pemerintah daerah yang memiliki website informatif sesuai acuan standar	10 SKPD (24% dari 41 SKPD)	79.000.000	10 SKPD	76.074.600	100
		Jumlah pengaduan informasi publik oleh masyarakat yang terakomodasi di website pemerintah yang ditindaklanjuti	7 Pengaduan		7 Pengaduan		100

		Jumlah fasilitasi layanan internet sehat dan edukatif kepada masyarakat	20 kali	26.000.000	18 kali	20.948.900	90
5	Meningkatnya efisiensi, transparansi, persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui electronic processing	100%	451.800.000	134 paket (78,82%) dari 170 paket	437.491.700	78,82
6	Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa	Persentase menara telekomunikasi yang layak memberikan akses telekomunikasi dengan baik kepada masyarakat dan pengguna sesuai peraturan yang berlaku	100%	50.000.000	99%	48.153.800	98,90
		Persentase penanganan pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi pembangunan menara telekomunikasi	100%		Tidak ada pelanggaran		
		Persentase radio pancar ulang (repeater) yang layak memberikan akses telekomunikasi dengan baik	100%	87.680.000	100%	83.748.328	100,00
	Jumlah Anggaran			970.480.000		934.272.278	

Amlapura, 2 Maret 2015
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Karangasem,



Ir. Gde Nourah Yudiantara, M.M.
NIP. 19630929 198903 1 016